

**PENGARUH KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN  
INDUSTRI KREATIF TERHADAP EKISTENSI PERBANKAN  
SYARIAH DI KABUPATEN JEPARA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
S1 Perbankan Syariah



Disusun oleh :

Iffatur Rizqiyyah (1505036038)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
S1 PERBANKAN SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Heny Yuningrum, SE., M.Si

NIP. 198106092007102005

Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, M.E.I.

NIP. 198210312015031003

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Iffatur Rizqiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : Iffatur Rizqiyah

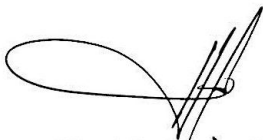
NIM : 1505036038

Judul : **Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat dan Industri Kreatif Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah di kabupaten Jepara**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Dosen Pembimbing I



Heny Yuningrum, SE., M.Si

NIP. 198106092007102005

Semarang, 9 Oktober 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing II



Singgih Muheramtohad, M.E.I

NIP. 198210312015031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454  
Semarang 50185

Website: [febi.walisongo.ac.id](http://febi.walisongo.ac.id) – Email: [febi@walisongo.ac.id](mailto:febi@walisongo.ac.id)

---

**PENGESAHAN**

Nama : Iffatur Rizqiyah

NIM : 1505036038

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat dan Industri Kreatif terhadap Eksistensi Perbankan Syariah di Kabupaten Jepara**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat coumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: **23 Oktober 2019**.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (Strata 1) dalam Ilmu Perbankan Syariah tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 23 Oktober 2019

Ketua Sidang

  
**Dr. H. Ahmad Furqon, L.C., MA**

**NIP. 19751218 200501 1 002**

Penguji I

  
**Heny Yuningrum, S.E., M.Si.**

**NIP. 19810609 200710 2 005**

Dosen Pembimbing I

  
**Heny Yuningrum, S.E., M.Si.**

**NIP. 19810609 200710 2 005**

Sekretaris Sidang

  
**A. Turmudi S.H., M.Ag.**

**NIP. 19690708 200501 1 004**

Penguji II

  
**Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, S.E., M.Si.**

**NIP. 19790512 200501 2 004**

Dosen Pembimbing II

  
**Siggih Muheramtohad, S.Sos.I., M.E.i.**

**NIP. 19821031 201503 1 003**

## MOTTO

Jangan biarkan kegagalan menghancurkanmu, bangkit dan raihlah mimpimu!

Allah pasti akan menunjukkan kebesaran dan kuasanya, bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa

“La haula wa la quwwata illa billahil ‘aliyyil azhim”  
Tiada saya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil A'lammin dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat dan Industri Kreatif Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah di Kabupaten Jepara**”. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang Insya Allah akan memberikan syafa'at kepada umat-Nya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendukung penulis sehingga skripsi ini bisa disusun sebagaimana mestinya.

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Bahrul Ulum dan Ibu Khilmatun Nafis. Terimakasih atas segala kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Untuk adik kesayangan Ziyadatul Ula, kakak penulis Muhammad Tashfin Faraz, Heni Fitriani dan keponakan penulis Rayyanka Dzikri Attaqy , terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini.
3. Terimakasih kepada Muhammad Faris Balya , seseorang yang dengan sabar menemani, mendoakan, mendukung dan memberi semangat yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

4. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku terutama Laila Nur Habibah dan Muhimmatul Choiroh yang selalu mendukung, membantu dan memberi semangat.

Terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk segala pengorbanan dan doa kalian, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kami semua di dunia maupun di akhirat.

Aamiin...

## DEKLARASI

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Iffatur Riqiyah

NIM : 1505036038

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat dan Industri Kreatif Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah di Kabupaten Jepara**” adalah benar-benar merupakan hasil penelitian penulis sendiri, bukan duplikasi karya orang lain dan tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian deklarasi ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan digunakan sebagaimana perlunya.

*Wassalamu 'alaikum, wr. wb.*

Semarang, 21 September 2019

Deklarator,



Iffatur Rizqiyah  
Nim: 150503603

## ABSTRAK

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa lainnya yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Eksistensi perbankan Syariah di Indonesia pada awalnya didasarkan pada Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 di mana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga maupun keuntungan-keuntungan bagi hasil. Eksistensi perbankan syari'ah semakin eksis setelah disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan dari Undang-undang no. 7 Tahun 1992. Undang-undang ini ini membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank Syari'ah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional dengan sistem syari'ah. UU No.10 tahun 1998 ini sekaligus menghapus Pasal 6 pada PP No.72/1992 yang melarang *dual* sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No.10 tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Selain itu juga, eksistensi perbankan Syari'ah diperkukuh dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi perbankan syariah di Kabupaten Jepara. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Jepara sebanyak 90 responden.

Adapun penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Sedangkan data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel independen yang meliputi kesejahteraan masyarakat dan industri kreatif, serta variabel dependen tentang eksistensi perbankan syariah.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap eksistensi perbankan syariah dengan nilai signifikansi 0,133, sedangkan industri kreatif berpengaruh positif signifikan terhadap eksistensi



perbankan syariah dengan nilai signifikansi 0,000. Kesejahteraan masyarakat dan industri kreatif secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap eksistensi perbankan syariah dengan nilai signifikansi 0,000.

Kata kunci: Eksistensi Perbankan Syariah, Kesejahteraan Masyarakat, Industri Kreatif

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayahNya kepada kita semua sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati segala anugerahNya. Semoga kita semua senantiasa diberikan umur panjang, dan kesehatan sehingga kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Segenap rasa syukur penulis ucapkan karena telah selesainya skripsi yang berjudul “PENGARUH KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN INDUSTRI KREATIF TERHADAP EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH DI KABUPATEN JEPARA” . Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam bentuk apapun. Ucapan terimakasih ini terutama penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. K.H Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Heny Yunungrum, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.

4. Heny Yuningrum, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Singgih Muheramtohadhi selaku pembimbing II atas arahan, bimbingan, saran dan kesediaan waktu yang diberikan dari awal hingga akhir.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Segenap masyarakat Jepara atas kesediaan waktu yang diberikan untuk pengisian kuesioner sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar.
7. Adik saya Ziyadatul Ula tercinta, kakak saya Tashfin Faraz dan Heni Fitriani dan untuk bocil Rayyanka dzikri keponakan saya yang paling lucu.
8. Sahabat sahabat saya , Laila Nur Habibah , Choirun Nada Firdausy dan Muhimmatul Choiroh yang selalu menyemangati penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk kawan-kawan PBASA semuanya yang selalu menghibur penulis dan memberi semangat

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Semarang, 26 Agustus 2019

Iffatur Rizqiyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Deskripsi Teori .....	10
2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah .....	10
2.1.2 Pengertian Eksistensi .....	19
2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat .....	21

2.1.4	Industri Kreatif .....	24
2.2	Penelitian Terdahulu .....	28
2.3	Kerangka Berfikir .....	36
2.4	Hipotesis .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis dan Lokasi Penelitian .....	39
3.2	Pendekatan Penelitian.....	39
3.3	Populasi dan Sampel .....	39
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	41
3.5	Definisi Konsep dan Operasional .....	42
3.6	Instrumen Penelitian.....	43
3.7	Uji Instrumen Penelitian.....	43
3.8	Uji Asumsi Klasik .....	44
3.9	Uji Koefisien Regresi Linier Berganda .....	46
3.10	Uji Hipotesis .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Masyarakat Jepara Kabupaten Jepara terletak di ujung utara Pulau Jawa. Nama Jepara berasal .....	49
4.1.1	Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jepara .....	50
4.1.2	Industri Kreatif di Kabupaten Jepara	60
4.1.3	Eksistensi Perbankan Syariah di Jepara	64
4.2	Deskripsi Responden.....	65
4.3	Pengujian Kualitas Data .....	66

4.3.1 Uji Validitas Data.....	66
4.3.2 Uji Reliabilitas .....	66
4.4 Uji Asumsi Klasik .....	67
4.4.1 Uji Normalitas.....	67
4.4.2 Uji Multikolinearitas .....	68
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas .....	68
4.5 Interpretasi Persamaan Regresi.....	69
4.6 Hasil Pengujian Hipotesis.....	70
4.6.1 Uji ttest (Uji Parsial) .....	70
4.6.2 Uji Ftest (Uji Pengaruh Simultan) .....	71
4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R <sup>2</sup> ).....	71
4.7 Pembahasan.....	72
4.7.1 Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah di Kabupaten Jepara .....	72
4.7.2 Pengaruh Industri Kreatif Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah di Jepara.....	74
4.7.3 Pengaruh kesejahteraan masyarakat dan industri kreatif Terhadap eksistensi perbankan syariah di kabupaten Jepara. ....	76

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	77
5.2 Saran.....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penduduk di Kabupaten Jepara Tahun 2016 .....	5
Tabel 1.2.	Profil Responden.....	5
Tabel 1.3.	Pengetahuan tentang Bank Syariah .....	6
Tabel 1.4.	Minat Masyarakat Terhadap Bank Syariah .....	6
Tabel 3.1	Variabel dan Indikator Penelitian.....	42
Tabel 4.1	Deskripsi Responden masyarakat Kabupaten Jepara	65
Tabel 4.2	Hasil Uji Validitas Masyarakat Jepara .....	66
Tabel 4.3	Hasil Uji Reliabilitas Masyarakat Jepara .....	67
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas .....	67
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinearitas.....	68
Tabel 4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	69
Tabel 4.7	Persamaan Regresi .....	69
Tabel 4.8	Uji Parsial .....	70
Tabel 4.9	Uji Pengaruh Simultan .....	71
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	72
Table 4.11	Pembahasan .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	38
Gambar 4.1	Peta Kondisi Fisik Kabupaten Jepara .....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa lainnya yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>1</sup> Menurut undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>2</sup> Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas pada sistem perbankan di Indonesia secara umum. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015) h.2.

<sup>2</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) h.39.

syariah juga di perhatikan dengan adanya “dual banking system”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. Dengan “dual banking system” ini diharapkan perkembangan perbankan syariah dapat bersaing dengan perbankan konvensional, namun faktanya pengguna perbankan syariah masih dikatakan minim, hal ini belum cukup membuat bank-bank syariah menjadi bank yang terbesar di Indonesia yang masih kurang dan market share perbankan syariah baru 5% dari total market perbankan secara umum.<sup>3</sup>

Tuduhan terhadap operasional perbankan syariah yang dinilai tidak menggunakan cara-cara yang benar semakin menyebar ke khalayak umum, hal ini didasarkan oleh banyaknya praktik-praktik yang dipandang menyimpang oleh aturan syariat itu sendiri. Persepsi masyarakat tentang perbankan syariah yang kemudian di klaim tidak menunjukkan perbedaannya dengan pola yang diterapkan perbankan konvensional, adalah sebagai akibat dari serangkaian informasi yang berkembang pada masyarakat satu ke masyarakat lainnya.

---

<sup>3</sup> Dede Aji Mardani, “Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia”. *Jurnal al-Afkar*. Vol.1,No.1, Januari 2018.

Problem yang sampai saat ini juga masih belum tuntas untuk diselesaikan adalah masyarakat masih ragu dan sepenuh hati dalam menggunakan industry keuangan syariah. Relevansi terhadap penyelesaian problem yang masih menjadi penghambat perkembangan industri keuangan syariah (khususnya di Indonesia) menurut Agustianto (2007) ada delapan faktor penyebab umat islam belum berhubungan dengan perbankan syariah pada khususnya dan lembaga keuangan syariah pada umumnya. Pertama, tingkat pemahaman dan pengetahuan umat tentang bank syariah masih sangat rendah. Masih banyak yang belum mengerti dan salah faham tentang perbankan syariah dan menganggap sama saja dengan bank konvensional, bahkan sebagian ustad yang tidak memiliki ilmu yang cukup memadai tentang ekonomi islam (ilmu ekonomi Makromoneter) masih berpandangan miring tentang bank syariah. Kedua, belum ada gerakan bersama dalam skala besar untuk mempromosikan bank syariah pada khususnya dan lembaga keuangan syariah pada umumnya. Ketiga, terbatasnya pakar dan SDM ekonomi syariah, Keempat, peran pemerintah masih kecil dalam mendukung dan mengembangkan ekonomi syariah. Kelima, peran ulama, ustadz dan da'i masih relative kecil. Keenam, peran para akademis di berbagai perguruan tinggi, termasuk

perguruan tinggi islam belum optimal. Ketujuh, peran ormas islam juga belum optimal membantu dan mendukung gerakan bank syariah. Terbukti masih banyak yang berhubungan dengan bank konvensional. Kedelapan, bank Indonesia kurang serius dalam mengembangkan bank syariah. Dua faktor lainnya menurut Kwat Ismanto (2009) sebagai penghambat perkembangan lembaga keuangan syariah yang perlu mendapat perhatian. Pertama, preferensi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah masih didasarkan pada persoalan agama, sehingga sebagian besar nasabah lembaga keuangan syariah adalah masyarakat muslim. Padahal menurut konsep dasarnya lembaga keuangan syariah dapat berlaku universal, artinya tidak untuk umat islam semata, tetapi juga bagi non-muslim. Kedua, tidak sedikit manajemen lembaga keuangan syariah yang ada sekarang masih dikelola secara konvensional. Artinya manajemen yang ada masih bercorak manajemen yang ada pada lembaga keuangan konvensional.<sup>4</sup>

Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat

---

<sup>4</sup>Syarif As'ad, "Tingkat Sosialisasi Perbankan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Memilih Bank Syariah di Kotagede Yogyakarta", *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol.8, No.2, Desember 2012.

suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang dengan karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (*riba*), transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*) dan spekulatif (*maysir*).<sup>5</sup>

Eksistensi dan konsistensi bank syariah dapat langsung diperbandingkan dengan bank konvensional dalam krisis tersebut. Selama krisis ekonomi terjadi, bank syariah ternyata dapat menunjukkan kinerja yang relative lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relative lebih rendahnya pembiayaan yang bermasalah (*non performing performance/NPF*) pada bank syariah dan tidak terjadinya negative spread dalam kegiatan operasionalnya. Kondisi ini tentu saja dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relative lebih rendah kepada masyarakat. Sebagai gantinya praktik operasional dalam perbankan syariah memakai prinsip jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, titipan dan jasa. Dengan kenyataan tersebut, pengembangan perbankan syariah

---

<sup>5</sup> Mulya Siregar, Agenda Pengembangan Perbankan Syariah untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan, *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, Vol.3, No.1, Muharram 1423 H.

diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional yang pada gilirannya juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dimasa mendatang. Ketahanan ekonomi nasional yang sedemikian rupa dapat menciptakan perekonomian yang tangguh, yaitu perekonomian yang pertumbuhan sektor keuangannya sejalan dengan pertumbuhan sektor rill.<sup>6</sup>

Eksistensi perbankan syariah di Kabupaten Jepara juga sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan industri kreatif di sana. Dengan menggeliatnya industri kreatif, maka eksistensi bank syariah semakin diakui oleh masyarakat. Masyarakat Jepara sebagian besar mempunyai usaha industri kreatif hal ini menandakan bahwa bank syariah semakin mempunyai kesempatan untuk berkembang di Kabupaten Jepara. Konsep ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan *stock of knowledge* dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Model pengembangan ekonomi kreatif layaknya sebuah bangunan yang akan menguatkan ekonomi Indonesia dengan landasan, pilar dan atap sebagai elemen – elemen bangunan tersebut.

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

Industri kreatif merupakan bagian tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dapat dikatakan sebagai suatu sistem transaksi penawaran dan permintaan yang bersumber pada kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut Industri Kreatif. Industri kreatif merupakan industri yang berasal dari kreativitas individu, ketrampilan, dan bakat yang secara potensial menciptakan kekayaan, dan lapangan pekerjaan melalui eksploitasi dan pembangkitan kekayaan intelektual dan daya cipta individu. Pondasi industri kreatif adalah sumber daya insani yang merupakan elemen terpenting dalam industri kreatif. Pembangunan industri kreatif yang kompetitif harus dilandasi oleh pembangunan SDM yang terampil, terlatih dan terberdayakan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan dan kreativitas.<sup>7</sup>

Kesejahteraan masyarakat pun bisa mempengaruhi eksistensinya karena kesadaran untuk mengelola uang dan takut akan riba membuat bank syariah mengalami perkembangan. Studi dari CMCS menyimpulkan bahwa telah terjadi revolusi dalam pergeseran perilaku kelas menengah Muslim di Indonesia yang sangat mendasar selama 5 tahun

---

<sup>7</sup> Diah Citraresmi Cahyadi, Luh. 2013. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kreatif Di Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi Universitas Udayana. hlm. 12

terakhir. Ciri-ciri semakin makmur, religious dan cerdasnya masyarakat kelas menengah muslim di Indonesia ditandai dengan fakta berikut ini: banyaknya wanita berhijab, kebutuhan akan fashion dan kosmetik syariah, meningkatnya muda-mudi yang berumroh, munculnya hotel syariah, gairah seni budaya islam, wisata syariah dan kepedulian terhadap makanan halal semakin meningkat. Gejala ini menunjukkan bahwa kelas menengah muslim yang cerdas, makmur dan religious semakin tumbuh. <sup>8</sup>

**Tabel. 1.1**  
**Penduduk di Kabupaten Jepara Tahun 2016**

Kecamatan	Penduduk WNI dan WNA		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1. Kedung	38.652	39.161	77.813
2. Pecangaan	42.047	43.035	85.082
3. Kalinyamatan	32.149	32.573	64.722
4. Welahan	36.987	37.856	74.843
5. Mayong	44.906	45.496	90.402
6. Nalumsari	36.457	37.698	74.155
7. Batealit	42.977	43.106	86.083
8. Tahunan	58.517	56.987	115.504
9. Jepara	44.713	44.403	89.116
10. Mlonggo	43.838	42.691	86.592
11. Pakis Aji	30.557	30.346	60.903
12. Bangsri	51.424	51.071	102.495
13. Kembang	34.474	35.648	70.122
14. Keling	30.862	31.586	62.448

---

<sup>8</sup> Lindiawatie dan Muzdalifah “Persepsi Kelas Menengah Muslim Terhadap Dual Banking System dalam Membentuk Kekuatan Merek Perbankan Syariah”SOSIO-E-KONS, Vol. 9 No. 3, Desember 2017, hal. 232-243.



15. Donorojo	27.918	28.286	56.204
16. Karimun Jawa	4.728	4.651	9.379
Jumlah/Total	601.206	604.594	1.205.800

Sumber : jeperakab.bps.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penduduk Jepara lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kemudian dibawah ini adalah tabel profil 10 responden.

**Tabel. 1.2.**  
**Profil Responden**

Variabel	Kategori	Frekuensi
Jenis kelamin	Laki-laki	6
	Perempuan	4
Pekerjaan	Pengusaha	3
	Pelajar	4
	Ibu Rumah Tangga	2
	Guru	1
Usia	Kurang dari 25 Tahun	4
	26-35 Tahun	3
	36-40 Tahun	1
	Lebih dari 45 Tahun	2

Sumber : data diolah 2019

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa responden yang mengetahui dan paham akan bank syariah kebanyakan di kalangan pelajar dan sekitar umur kurang dari 25 Tahun. Pengetahuan tentang Bank Syariah bisa dipahami dari aspek akadnya yang berbeda dengan bank Konvensional. Adapun hasil observasi tentang Bank Syariah adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1.3.**  
**Pengetahuan tentang Bank Syariah**

Variabel		Frekuensi
Istilah Bank Syariah	Tahu	8
	Tidak Tahu	2
Perbedaan BS dan BK	Tahu	6
	Tidak Tahu	4
Sumber Informasi	Keluarga/Teman	1
	Media Sosial/Internet	6
	Pengetahuan(Buku/Sekolah)	3
Kemudahan Informasi	Mudah	5
	Tidak Mudah	5

Sumber : Data diolah 2019

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui istilah bank syariah namun tidak mengetahui perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional karena kurang sosialisasi akan akad-akad yang ada di Bank Syariah. Kemudian sumber informasi responden kebanyakan dari media sosial atau internet yang terkadang masih simpang siur informasinya.

Aspek	Alasan	Frekuensi
Minat	Ya	7
	Tidak	3
Alasan Tidak Minat	Sulit dijangkau	6
	Produk kurang menarik	2
	Memilih Bank Konvensional	2
Alasan Minat	Pelayanan memuaskan	4
	Keyakinan pribadi	5
	Produk menarik	1

**Tabel. 1.4.**  
**Minat Masyarakat Terhadap Bank Syariah**  
 Sumber: data diolah 2019

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa banyak yang minat akan perbankan syariah, namun ada beberapa alasan tidak minat terhadap bank Syariah yaitu sulit dijangkau, memilih bank konvensional dan produk kurang menarik. Karena bank syariah di sekitar Kabupaten Jepara tergolong sedikit jadi apabila ingin menabung di Bank Syariah harus menempuh jarak yang lumayan jauh maka dari itu sebagian memilih bank Konvensional yang mudah dijangkau. tetapi alasan minat dengan Bank Syariah juga banyak yaitu pelayanan memuaskan, keyakinan pribadi dan produk menarik.

Berdasarkan hasil wawancara ke lima responden salah satu Bank Syariah di Kabupaten Jepara, yaitu BNI Syariah.

Menyatakan bahwa mereka menggunakan bank syariah karena “hijrah” atau bisa di bilang mereka takut akan dosa riba. Responden pertama yang bernama bapak Moh Zali pengusaha mebel yang besar di Jepara beliau berumur 45 tahun mengaku menggunakan bank syariah karena ingin terhindar dari riba, bapak Moh Zali menggunakan Bank Syariah sebagai rekening utama untuk bisnis mebelnya. Kemudian responden kedua yang bernama Afrizal Yusuf mengatakan bahwa menggunakan bank syariah karena ingin terhindar dari riba, Afrizal juga menggunakan bank syariah sebagai transaksi untuk bisnis yang ia tekuni saat ini. Untuk responden ke tiga Muhammad Aminuddin Najib mahasiswa Unisulla yang bertempat tinggal di kecamatan Menganti Jepara mengaku memakai bank syariah karena ingin menjauhi riba dan dekat dengan kampus.

Najib juga memakai rekening bank syariah untuk transaksi sehari-hari. Lalu responden ke empat Hamdan Yuwafi yang alamat rumahnya di Kecamatan Pecangaan Jepara, ia memakai bank syariah mengaku untuk tabungan haji, namun Wafi merencanakan untuk ke depannya akan menggunakan bank syariah untuk menabung dan transaksi dalam bisnisnya. Kemudian responden terakhir bapak Mustajib pemilik bisnis sangkar burung, beliau mengatakan

memakai bank syariah sudah cukup lama, semenjak adanya bank syariah muncul bapak Mustajib sudah memiliki rekening di bank syariah. Yang menjadi menarik dari keluarga bapak Mustajib adalah satu keluarganya telah memiliki rekening di bank syariah. Sudah jelas dari ke lima responden diatas menyatakan bahwa menggunakan bank syariah sebagai bank untuk menyelamatkan mereka dari dosa akan memakan harta riba, namun mengapa masyarakat lainnya masih enggan memakai jasa bank syariah yang jelas-jelas terhindar dari dosa riba.

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat dan Industri Kreatif Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah di Kabupaten Jepara”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Eksistensi Bank Syariah di Kabupaten Jepara sangat minim yaitu berada di pusat kota, itu menjadi alasan nasabah Bank Konvensional untuk tidak memilih Bank Syariah.
2. Responden yang sudah mengetahui Bank Syariah namun tidak menggunakan jasanya karena tidak tahu sistem dan akad yang digunakan bahkan masih menganggap sama dengan Bank Konvensional.

3. Pengguna Bank Syariah kebanyakan dari kalangan menengah kebawah.
4. Industri Kreatif berbasis Islam di Kabupaten Jepara masih sedikit

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang fokus dan menghindari penafsiran yang tidak diinginkan atas hasil penelitian, maka penelitian ini dititik beratkan pada eksistensi, industri kreatif dan kesejahteraan nasabah Bank Syariah yang berada di Kabupaten Jepara.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap eksistensi Perbankan Syariah di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana pengaruh industri kreatif terhadap eksistensi Perbankan Syariah di Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana pengaruh kesejahteraan masyarakat dan industri kreatif terhadap eksistensi perbankan syariah di Kabupaten Jepara?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap eksistensi Perbankan Syariah di Kabupaten Jepara
2. Mengetahui pengaruh industri kreatif terhadap eksistensi perbankan syariah di Kabupaten Jepara.
3. Mengetahui pengaruh kesejahteraan masyarakat dan industri kreatif terhadap eksistensi Perbankan Syariah di Kabupaten Jepara.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pengembangan teori mengenai eksistensi Perbankan Syariah terhadap industri kreatif dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Jepara.

### **2. Manfaat Secara Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti Lain**

Untuk melatih berpikir secara ilmiah yang didapat di bangku kuliah terhadap masalah-masalah yang terjadi di dunia perbankan khususnya dalam mengetahui kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jepara yang menggunakan jasa Bank Syariah dan Eksistensinya di Kabupaten Jepara, serta penelitian ini

dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian - penelitian selanjutnya yang relevan.

b. Bagi Bank Syariah

Untuk membantu pihak Bank Syariah khususnya di Kabupaten Jepara agar sistem marketing dari Bank Syariah semakin giat untuk mempromosikan produk-produk dan keunggulannya.

c. Bagi Penulis

Sebagai tolak ukur daya serap mahasiswa dalam hal kesejahteraan masyarakat dan industri kreatif terhadap eksistensi perbankan syariah di Kabupaten Jepara.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Deskripsi Teori

##### 2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Bank Syariah juga disebut *Islamic Banking* atau *Interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (*gharar*)<sup>9</sup> Gagasan mengenai Bank Syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan Bank Islam, misalnya Anwar Kureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi (1961).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 28.

Bank syariah yang pertama kali berdiri adalah *Islamic Rural Bank* di Desa Mit ghamr pada tahun 1963 di Kairo Mesir. Kemudian Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah *Dubai Islamic bank* , yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Selanjutnya perkembangan bank syariah secara internasional dimulai dengan Sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, Desember 1970 dimana dalam sidang tersebut Mesir mengajukan sebuah proposal yang mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan sebuah sitem kerja sama dengan skema bagi hasil atas keuntungan maupun kerugian. Dimana dalam sidang tersebut disetujuiilah rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Dari sinilah kemudian bermunculan Bank-bank Islam di berbagai belahan dunia.<sup>11</sup>

Di Indonesia pada awalnya perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank. Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 24-26.

berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia , yang kemudian disusul oleh bank-bank lain yang membuka jendela syariah ( *Islamic Window* ) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank Syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain yaitu :

- a. Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94;
- b. Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182;
- c. Undang-undang No 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
- d. Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Peraturan Bank Syariah Nomor 9/19/PBI/2007 maka prinsip syariah yang dapat dilaksanakan oleh bank yang kegiatan usahanya sesuai syariah (Rachmadi Usman,2009:22)<sup>12</sup>

#### **2.1.1.1 Pengertian dan Karakteristik Perbankan Syariah**

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 7 UU No 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Pada pasal 1 tersebut pula dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Syariah

---

<sup>12</sup> Rahmadi Usman,, Produk dan Akad Perbankan Syariah Indonesia )Implementasi dan Aspek Hukum PT Citra Aditya, 2009, hlm 17.

adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Salah satu karakteristik bank syariah yang membedakannya dengan Bank Konvensional adalah penggunaan prinsip syariah di dalam setiap kegiatan Bank Syariah. Pada Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan “ Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” Bisnis Syariah haruslah berdasarkan prinsip syariah, maka kegiatan usaha tidak boleh mengandung unsur:<sup>13</sup>

1. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhhl*) , atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 9-10.

diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

Pelarangan riba terdapat dalam QS Albaqarah (2) : 275 yang artinya “ bagimu jual beli, dan Aku haramkan bagimu riba...

2. *Maisir*, yaitu transaksi yang mengandung perjudian , untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Kata maysir dalam arti arti harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu disebut berjudi.

Pelarangan maysir terdapat dalam QS: Al maidah (5) : 91 bahwa “ sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permuduhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat ; maka berhentilah kamu (dari mengerjakannya).

3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Pelarangan gharar terdapat dalam QS Al baqarah : 188 yang artinya “ dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan )janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>14</sup>

#### **2.1.1.2 Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.**

Secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dan bank konvensional dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>15</sup>

##### **1. Kegiatan Penghimpunan dana (*Funding*)**

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Untuk tabungan dan giro bisa didasarkan pada akad *wadiah* atau akad *mudharabah*. Sedangkan untuk deposito hanya menggunakan akad *mudharabah*.

##### **a. Akad Wadiah**

---

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)* (Bandung: Refika Aditama, 2009), , hlm. 65.

Akad wadiah adalah titipan dari pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan keinginan pemilik. Akad ini bertujuan untuk menjaga keamanan suatu barang tersebut (Wiroso, 2005:20)<sup>16</sup>

b. Akad Mudharabah

Berdasarkan Fatwa DSN No:115/DSN-MUI/IX/2017 akad mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengusaha (mudharib) dan keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang mereka sepakati dalam akad. Usaha yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

2. Kegiatan Penyaluran Dana (*Lending*)

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qardh*.

---

<sup>16</sup> Wiroso, Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm 20.

<sup>17</sup> Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/XI/2017



Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk, margin keuntungan untuk *murabahah*, bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah* serta biaya administrasi untuk *Qardh*.

a. Akad Murabahah

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 akad murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menjelaskan harga beli awal kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>18</sup>

b. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut shahibul mal, menyediakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan

---

<sup>18</sup> Fatwa DSN MUI No.111/DSN-MUI/XI/2017

yang ditentukan sebelumnya dalam akad ( yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar)<sup>19</sup>

c. Akad Musyarakah

Menurut Fatwa DSN MUI No: 114/DSN-MUI/XI/2017 akad musyarakah atau syirkah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk modal usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai proporsional.<sup>20</sup>

d. Akad Salam

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Pembayaran harus dilakukan saat

---

<sup>19</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 2015, hlm.60

<sup>20</sup> Fatwa DSN MUI No:114/DSN-MUI/XI/2017

kontrak disepakati, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian.<sup>21</sup>

e. Akad Istisna'

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 akad istisna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.<sup>22</sup>

f. Akad Ijarah

Menurut fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 akad ijarah adalah akad sewa antara pihak yang menyewakan barang (mu'jir) dan pihak yang menyewa ( musta'jir) dengan pihak yang memberikan jasa akad ijarah (ajir) untuk mempertukarkan manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan dengan ujah baik manfaat barang maupun jasa.

g. Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)

Akad IMBT adalah akad ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik

---

<sup>21</sup> Ibid, No:05/DSN-MUI/IV/2000

<sup>22</sup> Ibid, No:06/DSN-MUI/IV/2000

atas barang sewa kepada pihak penyewa setelah akad ijarah berakhir.<sup>23</sup>

h. Akad Qardh

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 akad qardh adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan wajib mengembalikan dana yang diterima kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati dalam hal ini bank syariah dan nasabah.<sup>25</sup>

i. Akad Rahn

Rahn (mortgage) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan

---

<sup>23</sup> Fatwa DSN-MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017

<sup>24</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.46

<sup>25</sup> Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001

tertentu dari pemberi amanah.<sup>26</sup>. Menurut Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 rahn adalah akad pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerima barang (murtahin) mempunyai hak menahan barang (marhun) sampai semua utang yang menyerahkan barang (rahin) lunas. Barang dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang kecuali atas izin rahin dengan tidak mengurangi nilai dan manfaat marhun.<sup>27</sup>

j. Akah Hawalah

Hawalah (Transfer Service) adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No: 12/DSN-MUI No: 12/DSN-MUI/IV/2000 hawalah adalah akad

---

<sup>26</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 108

<sup>27</sup> Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/IV/2000.

<sup>28</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PR Raja Grafindo, 2015, hlm.107

pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Hawalah dilakukan harus sesuai dengan izin orang yang mempunyai utang dan sekaligus berpiutang (muhil), orang yang mempunyai piutang kepada muhil (muhal), dan orang yang mempunyai utang kepada muhil (muhal ‘alaih)<sup>29</sup>

### 3. Jasa Bank

Kegiatan usaha di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *Letter of Credit* (L/C), *Hiwalah*, *Wakalah* dan jual beli valuta asing. Adapun kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yakni meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

---

<sup>29</sup> Fatwa DSN-MUI No:12/DSN-MUI/IV/2000

- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *ishtishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- g. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pada pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *Ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah*;
- i. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- j. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- k. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;



- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- n. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- o. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- p. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Dibawah ini adalah akad-akad yang ada pada jasa perbankan syariah :

#### 1. Akad Kafalah

Akad kafalah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Dalam akad kafalah penjamin mendapat fee selama tidak

---

<sup>30</sup> <http://www.ojk.go.id> diakses pada 5 Mei 2019

memberatkan. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh diputuskan secara sepihak.<sup>31</sup>

## 2. Akad Wakalah

Menurut Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 akad wakalah adalah pemberian kuasa dari pihak yang memberi kuasa (muwakil) kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan pembuatan hokum tertentu<sup>32</sup>

### 2.1.2 Pengertian Eksistensi

Kata eksistensi berasal dari kata Latin *existere, daei ex keluar: sitere* = membuat berdiri. Artinya apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas, apa saja yang dialami. Konsep ini menekankan bahwa sesuatu itu ada. Eksistensi berbeda dengan pengertian esensi. Jika esensi lebih menekankan ‘apanya’ sesuatu sedangkan eksistensi menekankan ‘apanya’ sesuatu yang sempurna. Dengan kesempurnaan itu sesuatu menjadi suatu eksisten.

---

<sup>31</sup> Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000

<sup>32</sup> Ibid, No: 113/DSN-MUI/XI/2017

Dalam konsep eksistensi, satu-satunya faktor yang membedakan setiap hal yang ada dari tiada adalah fakta. Setiap hal yang ada itu mempunyai eksistensi atau ia adalah suatu eksisten. Dengan demikian jika sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan eksistensi maka juga sama sekali tidak tampil sebagai suatu eksisten.<sup>33</sup>

### **2.1.2.1 Eksistensi Perbankan Syariah**

Bank mempunyai andil yang sangat besar dalam proses pembangunan suatu bangsa. Bank berfungsi sebagai lembaga “*financial intermediary*” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. Kehadiran bank syariah dengan prinsip ke-Islamannya yang tidak mengenal riba bagaikan angin segar bagi dunia perekonomian Indonesia. Terlebih Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya keberadaan bank syariah sangat sesuai dengan kondisi tersebut. Bagi masyarakat yang beragama muslim tentunya tidak akan ragu dalam melakukan transaksi di bank syariah. Meskipun berdasarkan prinsip Islam namun bank syariah tidak menutup

---

<sup>33</sup> Save M. Dagon, *Filsafat Eksistensialisme*, (Jakarta: Rineka Cipta,1990), hlm 19.

diri terhadap masyarakat yang beragama non muslim. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keberadaan bank syariah adalah untuk melayani seluruh warga Indonesia yang memerlukan, tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu saja.<sup>34</sup>

Eksistensi perbankan Syariah di Indonesia pada awalnya didasarkan pada Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 di mana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga maupun keuntungan-keuntungan bagi hasil. Eksistensi perbankan syari'ah semakin eksis setelah disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan dari Undang-undang no. 7 Tahun 1992. Undang-undang ini ini membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank Syari'ah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional dengan sistem syari'ah. UU No.10 tahun 1998 ini sekaligus menghapus Pasal 6 pada PP No.72/1992 yang melarang *dual* sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No.10 tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Selain itu juga, eksistensi

---

<sup>34</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 2007, hlm, 98.

perbankan Syariah diperkukuh dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004.

Keberadaan Perbankan Syariah semakin kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang merupakan UU yang mengatur dan menjadi landasan hukum eksistensi Perbankan Syariah. Namun demikian, dari segi eksistensi dan operasionalnya bank syariah masih memiliki kendala-kendala. Kendala-kendala dari segi eksistensinya meliputi kendala fiqh, problem hukum dan sosialisasi. Sedangkan kendala-kendala dalam operasionalnya meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Peraturan-undangan di bidang perbankan yang belum memadai, khususnya mengenai penyelesaian sengketa dan Minimnya akademisi perbankan syariah. Lingkungan akademisi (termasuk lingkungan Perguruan Tinggi Agama).<sup>35</sup>

### **2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat**

Tindakan manusia yang dilandasi oleh proses berfikir dengan menetapkan beberapa faktor penentu. Merujuk dalam undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun

---

<sup>35</sup>Abdul Halim Barkattullah, *Problem Eksistensi dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia*, Fakultas Hukum Unlam, hlm. 14.

1974 Bab 1 pasal 2 ayat 1, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial meteril maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan Pancasila. Dalam perkembangannya, undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 dalam Bab I pasal 2 tersebut telah diperbaharui dengan produk hukum UU Nomor 11 Tahun 2009. Dalam pembaharuan tersebut , kondisi sejahtera adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sehingga dari pengertian diatas, dapat kita urai mengenai indkator kesejahteraan adalah perasaan aman selamat , perasaan tentram atau bahagia, terpenuhinya kebutuhan secara fisik dan non-fisik. Oleh karena itu, kondisi sejahtera ditandai dengan beberapa aspek berikut :

1. Terpenuhi hak dasar<sup>36</sup>
2. Tersedianya jaminan keamanan terhadap resiko penurunan kesejahteraan
3. Terjaminnya kesempatan untuk memiliki asset, yang memungkinkan terjadinya peningkatan/akumulasi kesejahteraan secara mandiri dan sustain dalam system ekonomi masyarakat.
4. Terintegrasinya kegiatan perekonomian masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi<sup>37</sup>
5. Terjaminnya kesempatan untuk berpartisipasi aktif guna menegosiasikan program kesejahteraan yang cocok dengan preferensi mereka.<sup>38</sup>

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dengan melihat kemampuan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya maka dapat dikatakan semakin seorang mampu memenuhi kebutuhan berbagai kehidupan hidupnya maka dapat

---

<sup>36</sup> Muhammad Izzul Haq dan Arin Mamlakah Kalamika, “*Kesejahteraan Nasabah Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta*” Membangun Profesionalisme Keilmuan, Edisi Juli-Desember 2016. Hal. 185.

<sup>37</sup> Michael Sherraden, *Aset untuk orang miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

<sup>38</sup> Muhammad Izzul Haq dan Arin Mamlakah Kalamika, “*Kesejahteraan Nasabah Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta*” Membangun Profesionalisme Keilmuan, Edisi Juli-Desember 2016. Hal. 185.

dikatakan semakin tinggi pula kesejahteraannya. Kita dapat memberikan gambaran umum tentang sejahtera tersebut, tetapi kita masih mengalami kesulitan menilai apakah seseorang tergolong sejahtera atau tidak karena penilaian tentang tingkat kesejahteraan seseorang sangat relatif. Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa sejahtera sebenarnya tidak hanya melulu pada kecukupan material saja, akan tetapi terpenuhinya juga unsur spiritual dan sosial dari seseorang.

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila ada upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani atau keselarasan antara keduanya adalah yang dinamakan kesejahteraan. Pencapaian kebutuhan jasmani dapat diukur menggunakan tolok ukur kebendaan, dimana masing-masing individu mempunyai ukuran berbeda sesuai dengan kemampuannya. Ada yang secara materi dapat mencapai tingkat sangat tinggi



jika diukur berdasarkan keutuhan fisik minimum, namun ada pula yang berada di bawah garis ukuran minimum.

a. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan

Telah diketahui bahwa kesejahteraan dapat diperoleh apabila terjadi keseimbangan atau keserasian antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah beberapa indikator yang menjadi ukuran antara lain:

- 1) Tingkat pendapatan keluarga
- 2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non pangan
- 3) Tingkat pendidikan keluarga
- 4) Tingkat kesehatan keluarga
- 5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Melihat indikator dari Biro Pusat Statistik tersebut kiranya pendidikan memanglah penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga. Menempuh pendidikan penting dilakukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan menempuh pendidikan

diharapkan seseorang mempunyai pola pikir yang lebih maju sehingga dia mempunyai lebih banyak pilihan untuk melakukan sesuatu guna mencapai kesejahteraan hidupnya.

b. Alat Ukur Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan suatu keluarga dapat diketahui dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Semakin seseorang mampu memenuhi beragam kebutuhan hidupnya maka mereka semakin sejahtera. BKKBN membagi tingkatan kesejahteraan keluarga menjadi lima tahapan, yaitu :

- 1) Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)
- 2) Tahapan Keluarga Sejahtera I ( KSI)
- 3) Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)
- 4) Tahapan Keluarga Sejahtera 3 (KS III)
- 5) Tahapan Keluarga Sejahtera 3 Plus ( KS III+)<sup>39</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara, yang mana

---

<sup>39</sup> Mutiara Pradipta, Skripsi: “ *Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Padi di desa Sumber Agung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*”(Yogyakarta: UNY, 2017), hal 10-14

masyarakat merasa benar-benar tercukupi semua kebutuhan tersebut.

#### **2.1.4 Industri Kreatif**

Industri Kreatif bukan merupakan sesuatu yang bersifat universal, karena sebenarnya merefleksikan tradisi kebudayaan Anglo-Amerika dalam pembuatan kebijakan di bidang kebudayaan dan yang memandang hak kekayaan intelektual sebagai *tradable economic goods*. Di Eropa khususnya, berkembang dua buah tradisi kebijakan yang berbeda di sektor kebudayaan dalam kaitannya dengan industri kreatif. Pada dekade tahun 1980-an, istilah yang digunakan pada awalnya adalah *cultural industry* (industri budaya). Istilah ini digunakan karena pada waktu itu kebijakan yang dikembangkan adalah mendorong lebih banyak orang berpartisipasi dalam bidang seni dan budaya atau disebut juga dengan istilah *cultural democracy* dengan mengembangkan seni modern seperti musik populer sebagai lawan atas seni yang bercita rasa tinggi seperti opera, balet dan musik klasik, yang menciptakan kelompok eksklusif dalam masyarakat. Istilah industri budaya kemudian secara bertahap mengalami perkembangan menjadi *creative industry* (industri kreatif), yang menekankan kepada masalah *individual talent and the generation of wealth and employment*. Istilah ini

kemudian lebih mengedepankan aspek individualisme dan hasil di bidang ekonomi daripada kolektivisme dan nilai-nilai sosial.

Istilah industri kreatif pertama kali diperkenalkan oleh tokoh bernama John Howkins, penulis buku *Creative Economy, How People Make Money from Ideas*. Jhon Howkins adalah seorang yang multi profesi. Selain sebagai pembuat film dari Inggris ia juga aktif menyuarakan industri kreatif kepada pemerintah Inggris sehingga dia banyak terlibat dalam diskusi-diskusi pembentukan kebijakan industri kreatif dikalangan pemerintahan negara-negara Eropa. Menurut definisi Howkins, industri kreatif adalah kegiatan industri dimana input dan outputnya adalah gagasan. Benar juga, esensi dari kreatifitas adalah gagasan. Bayangkan hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang sangat layak. Gagasan yang dimaksud yaitu gagasan yang orisinil dan dapat diproteksi oleh HKI. Contohnya adalah penyanyi, bintang film, pencipta lagu, atau periset mikro biologi yang sedang meneliti farietas unggul padi yang belum pernah diciptakan sebelumnya.

Definisi industri kreatif yang saat ini banyak digunakan oleh banyak pihak yang berkecimpung dalam industri kreatif adalah definisi berdasarkan UK DCMS ( Departement of

Culture , Media and Sport) Task Force di Inggris tahun 1998: *“Creative industries as those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property and content”*. (Industri Kreatif merupakan industri yang berasal dari kreativitas individu, ketrampilan, dan bakat yang secara potensial menciptakan kekayaan, dan lapangan pekerjaan melalui eksploitasi dan pembangkitan kekayaan intelektual dan daya cipta individu”) (Gunaryo, 2008).

Studi pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia 2007 juga menggunakan acuan definisi industri kreatif yang sama, sehingga industri kreatif di Indonesia dapat didefinisikan sebagai berikut : “industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut (Gunaryo 2008).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Erni yusnita Siregar, Saparuddin Siregar dan Andri Soemitra, *“Analisis Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Industri Kreatif Di Sumatra Utara Tahun 2006-2015”* j-EBIS . Vol.2 No. 3 Edisi April 2016, hal. 2.

**Istilah** industri kreatif di Indonesia seering diartikan sebagai tindakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan, serta bakat individu yang melekat pada seseorang. Pemanfaatan industri kreatif bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi serta daya cipta individu tersebut, baik secara individu maupun kelompok kerja. Kebijakan yang mengatur tentang industri ekonomi kreatif dituangkan dalam bentuk instruksi Presiden RI nomor 6 Tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Industri kreatif dapat sebagai sebuah industri yang mempunyai ide-ide baru, SDM yang kreatif dan juga mempunyai kemampuan dan bakat yang terus dikembangkan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan (Setyoso hardjowisastro, 2009). Cokorda Istri Dewi (2009) menjelaskan bahwa industri kreatif berasal dari ide manusia yang merupakan sumber daya yang selalu terbaharukan. Berbeda dengan industri yang bermodalkan bahan baku fisik, industri kreatif bermodalkan ide-ide kreatif, talenta dan ketrampilan.

Menurut *United Nation Conference on Trade and Development/ UNCTAD* (2008) dalam mohammad Adam Jerusssalem (2009), industri kreatif adalah :

1. Siklus kreasi, produksi dan distribusi dari barang dan jasa yang menggunakan modal kreatifitas dan intelektual sebagai input utamanya.
2. Bagian dari serangkaian aktivitas berbasis pengetahuan, berfokus pada seni, yang berpotensi mendatangkan pendapatan dari perdagangan dan hak atas kekayaan intelektual.
3. Terdiri dari produk-produk yang dapat disentuh dan intelektual yang tidak dapat disentuh atau jasa-jasa artistic dengan muatan kreatif, nilai ekonomis, dan tujuan pasar.
4. Bersifat lintas sektor antara seni,jasa dan industri dan
5. Bagian dari suatu sektor dinamis baru dalam dunia perdagangan.

Di Indonesia, kebijakan Presiden RI nomor 6 Tahun 2009 tentang pengembangan Industri Kreatif ditunjukkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat yang bertumpu pada kreativitas, ketrampilan dan bakat inidividu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun lingkup Industri Kreatif antara lain:

1. Perikanan
2. Arsitektur

3. Pasar seni dan barang antic
4. Kerajinan
5. Desain
6. Fashion
7. Film, video dan fotografi
8. Permainan interaktif
9. Music
10. Seni pertunjukkan
11. Penerbitan dan percetakan
12. Layanan computer dan piranti lunak
13. Radio dan televise dan
14. Riset dan pengembangan.<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa industri kreatif adalah industri-industri yang mengandalkan kreatifitas individu, keterampilan serta talenta yang memiliki kemampuan meningkatkan taraf hidup dan penciptaan tenaga kerja melalui penciptaan (gagasan) dan eksploitasi HKI.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

---

<sup>41</sup> Agus Rochani “*Strategi Pengembangan Industri Kreatif dalam Mewujudkan Kota Cerdas*” perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas islam Sultan Agung, hal 83-84



1. Penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Izzul Haq dan Arin Mamlakah Kalamika (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Industri Kreatif Di Sumatra Utara Tahun 2006-2015 . penelitian ini menunjukkan bahwa Lahirnya UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1990 dijadikan dasar hukum bagi terselenggaranya Perbankan Syariah di Indonesia. Sayangnya, meskipun bertahun-tahun beroperasi, bank syariah tidak menjadi primadona yang dipilih oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Hal tersebut, apabila dilihat dalam perspektif nasabah dikarenakan mereka belum memenuhi kaidah-kaidah kesejahteraan yang terintegrasi. Artinya, dalam hal yang berkaitan dengan pemenuhan nilai spiritualitas masih belum mengakomodir sisi spiritualitas yang katanya nir-riba. Sehingga nasabah yang memilih lembaga keuangan syariah baru bisa berharap mampu meminimalisir riba yang diharamkan oleh agama. Faktor pemenuhan kesejahteraan yang sementara ini ada dan mengakomodir nasabah hanyalah kalkulasi tujuan yang tidak lain hanya berupa pemenuhan pelayanan yang baik bagi nasabah syariah dibanding bank konvensional seperti tidak perlu mengantri dan tidak adanya pemotongan biaya administrasi semata. Oleh karena itu, sebagai saran kami untuk

peningkatan kesejahteraan yang komprehensif kepada nasabah perbankan syariah tidak lain adalah melakukan reformasi kelembagaan keuangan yang benar-benar syar'i sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan yang dapat terwujud atas dasar preferensi nilai religi Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Saputra Siregar (2017) dengan judul Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Perbankan Syariah Terhadap Market Share Aset Perbankan Syariah Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal perbankan syariah secara parsial terhadap market share aset perbankan syariah di Indonesia periode Januari 2012-September 2016 dan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal perbankan syariah secara simultan terhadap market share aset perbankan syariah di Indonesia periode Januari 2012-September 2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variable pembiayaan bank syariah di Indonesia terhadap kesejahteraan (Indeks Pembangunan Manusia) di Indonesia pada tahun 2010-2012. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 3.029907 dengan tingkat signifikan sebesar 0,0031 yang berarti lebih besar dari

0,05. Dengan demikian, kenaikan atau penurunan pembiayaan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Suryati yang menyatakan bahwa pemberian pembiayaan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan nasabah melalui perkembangan usaha. Hal ini disebabkan karena dengan bertambahnya jumlah pembiayaan maka Perbankan Syariah berhasil menciptakan nilai pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan sehingga nasabah mempunyai kesempatan besar untuk melakukan kegiatan usaha guna meningkatkan kesejahteraan.

3. Penelitian yang dilakukan Erni Yusnita Siregar\* ,Saparuddin Siregar\*\* , Andri Soemitra\*\*\* (2016) dengan judul ANALISIS PENGARUH PERBANKAN SYARI'AH TERHADAP INDUSTRI KREATIF DI SUMATERA UTARA TAHUN 2006 – 2015

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:secara bersama-sama menunjukkan bahwa sekitar 76,2% variabel TNK, PRSH, EX, dan PSYRH mempengaruhi PDRB Industri Kreatif di Sumatera Utara periode 2006 - 2015, sedangkan 23,8 %

dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Jumlah Tenaga Kerja (TNK) memberikan pengaruh signifikan terhadap PDRB Industri Kreatif di Sumatera Utara artinya semakin meningkat TNK maka semakin meningkat PDRB Industri Kreatif di Sumatera Utara. Jumlah Perusahaan (PRSH) memberi pengaruh signifikan terhadap PDRB Industri Kreatif di Sumatera Utara, hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah perusahaan, maka semakin meningkat PDRB Industri Kreatif di Sumatera Utara. Jumlah Ekspor (EX) memberi pengaruh signifikan terhadap PDRB Industri Kreatif di Sumatera Utara, Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak Jumlah ekspor, maka semakin meningkat PDRB Industri Kreatif di Sumatera Utara. Jumlah Pembiayaan Syariah (PSYRH) memberi pengaruh signifikan terhadap PDRB Industri Kreatif di Sumatera Utara, hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat PSYRH maka akan semakin meningkat PDRB Industri Kreatif di Sumatera Utara.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ninik Hariyati (2010) dengan judul Peran Bank Syariah Dalam Mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Perkembangan ekonomi kreatif menunjukkan gejala yang baik, apabila

didukung dengan pembiayaan, pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang baik seperti pembiayaan syariah. Bagi industri kreatif, kemudahan pembiayaan bagi pelaku usaha adalah hal yang penting. Karena bisa membantu permodalan melalui pembiayaan yang bersyarat mudah. Akses pembiayaan syariah ini juga harus semakin dipermudah dengan penambahan jumlah dan lokasi kantor perbankan syariah. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah adanya kemitraan antara bank dengan pelaku usaha. Serta aturan di bank yang memudahkan pelaku usaha mengembangkan usahanya. Pembiayaan syariah dapat mengakselerasi industri kreatif karena beberapa hal. Pertama; pembiayaan itu akan mengairahkan sektor riil karena bisa meningkatkan keterlibatan bank, dari pembiayaan, pendampingan, hingga monitoring industri. Kedua; pembiayaan itu mendorong pertumbuhan pengusaha/ investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Apalagi bank syariah merupakan lembaga keuangan Islam yang berbasis aset. Bank syariah bertransaksi berdasarkan aset riil, tidak mengandalkan pada kertas kerja semata. Apabila pelaku industri kreatif mengalami kerugian maka yang menanggung adalah bank

syariah sebagai pemilik modal sehingga bank syariah sangat berhati-hati dalam pembiayaan ini.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Fithriah Cantika dengan judul Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan Industri Kreatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Perkembangan ekonomi kreatif menunjukkan gejala yang baik, apabila didukung dengan pembiayaan, pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang baik seperti pembiayaan syariah. Bagi industri kreatif, kemudahan pembiayaan bagi pelaku usaha adalah hal yang penting. Karena bisa membantu permodalan melalui pembiayaan yang bersyarat mudah. Akses pembiayaan syariah ini juga harus semakin dipermudah dengan penambahan jumlah dan lokasi kantor perbankan syariah. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah adanya kemitraan antara bank dengan pelaku usaha. Serta aturan di bank yang memudahkan pelaku usaha mengembangkan usahanya. Pembiayaan syariah dapat mengakselerasi industri kreatif karena beberapa hal. Pertama; pembiayaan itu akan menggerakkan sektor riil karena bisa meningkatkan keterlibatan bank, dari pembiayaan, pendampingan, hingga monitoring industri. Kedua; pembiayaan itu mendorong

pertumbuhan pengusaha/ investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Apalagi bank syariah merupakan lembaga keuangan Islam yang berbasis aset. Bank syariah bertransaksi berdasarkan aset riil, tidak mengandalkan pada kertas kerja semata. Apabila pelaku industri kreatif mengalami kerugian maka yang menanggung adalah bank syariah sebagai pemilik modal sehingga bank syariah sangat berhati-hati dalam pembiayaan ini. Beberapa saran diperlukan diantaranya: pertama, Perlu adanya tingkat kepercayaan yang tinggi pada lembaga keuangan maupun donor terhadap industri kreatif sebagai industri yang menarik untuk berinvestasi, dan terciptanya informasi simetrik antara pelaku usaha dengan lembaga intermediasi. Kedua, Perlu diciptakan skema dan lembaga pembiayaan yang mendukung tumbuh kembangnya industri kreatif di Indonesia. Ketiga, Pemerintah hendaknya bukan saja menyediakan berbagai program bantuan atau pendanaan (kredit) kepada para pelaku industri kreatif, tapi yang lebih penting lagi kemudahan dalam mengakses dan memperolehnya. Keempat, Diperlukan analisis pembiayaan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses

pembiayaan. Kelima, Pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan supaya memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan sehingga tujuan daripada adanya pembiayaan bisa tercapai. Keenam, Perlu peran pemerintah untuk memberikan kemudahan akses dan dukungan terhadap kemajuan bank syariah di Indonesia sehingga bank syariah bisa diterima di semua lapisan masyarakat dan lebih berkontribusi kepada pemerintah dalam pembangunan nasional. Ketujuh, Bank syariah harus lebih kreatif, inovatif, dan dinamis dalam pengeluaran dan pengembangan produk-produk pembiayaan sehingga bank syariah bisa bersaing dengan bank konvensional.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid dan Aris (2017) dengan judul Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Bank Syariah sebagai lembaga yang keuangan Islam harus berbenah dalam rangka ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat. Oleh karena itu yang terbangun selama ini bahwa bank syariah hanyalah sebuah label Islam patut kita benarkan karena semangat sebagian komponen yang terkait dengan



institusi tersebut bersifat tergesa gesa yang hanya berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat konglomerasi. Akibatnya, keberadaannya belum memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Rasionalisasi keberadaan lembaga bank syariah harus berfokus pada pemerataan kekayaan kepada seluruh masyarakat khususnya kaum miskin yang diharapkan akan memberikan kemampuan daya beli sejalan dengan konsep alquran yaitu zakat. Pemberdayaan dana zakat dalam hal ini sebagai instrumen paradigma, konsepsi dan filosofis sementara bank syariah sebagai instrumen implementatif, operasional empirik yang akan diharapkan berjalan searah menuju masyarakat yang berkesadaran ekonomi ilahiyah dalam rangka mengurai kesenjangan yang semakin melebar. Kesadaran oleh semua unsur dalam menumbuhkembangkan lembaga keuangan syariah serta perannya dalam pembangunan khususnya mengurai kesenjangan tersebut diperlukan kerja keras serta pemikiran yang kritis dengan meriview kembali keberadaannya. Oleh karena itu diperlukan langkah langkah yang strategis :

1. Peningkatan sosialisasi konsep ekonomi islam secara komprehensif yang bersumber dari Al-quran, Hadis dan Ijtihad para ulama.
2. Pengembangan dan penyempurnaan institusi-institusi ekonomi syariah yang sudah ada.

- Memproteksi secara ketat agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip ajaran islam, bukan hanya terjebak pada labelisasi halal tanpa ada garansi dari pihak yang berkompeten
3. Perbaikan dan penyempurnan regulasi yang ada baik implementasi fatwa para ulama maupun regulasi pemerintah dengan melibatkan pemerintah daerah masing-masing
  4. Peningkatan kualitas SDM yang memiliki kualifikasi dan wawasan ekonomi dan keuangan syariah yang memadai sebagai ilustrasi (pada tingkat sekolah menengah menguasai kitab kuning/pesantren, strata satu (S1) masuk dibidang ilmu ekonomi dan keuangan konvensional, S2 dan S3 masuk ekonomi Islam).
  7. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Barokah dan Ayu Noviana Hanum (2014) yang berjudul Analisis Persepsi Nasabah dan perkembangan UMKM Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah ( Studi kasus BPRS Binama Kota Semarang) : menyatakan bahwa Dari hasil analisis data yang diolah mengenai variabel persepsi nasabah setelah memperoleh pembiayaan dari BPRS Binama, dari proses pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan data para responden , pembiayaan di BPRS binama dinilai mudah, tepat waktu dan baik. Pada variabel Perkembangan UMKM setelah memperoleh pembiayaan mudharabah dengan hasil uji tanda pangkat

wilcoxon pada perhitungan modal kerja di dapatkan nilai didapatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima yaitu ada perbedaan modal antara sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan mudharabah dan mengalami peningkatan sebesar 165%. Pada perhitungan omset penjualan didapatkan nilai Asymp. Sig. (2tailed) sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima yaitu ada perbedaan omset penjualan antara sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan mudharabah dan meningkat sebesar 79% Ada perbedaan pada jumlah tenaga kerja setelah mendapat pembiayaan hal ini di buktikan dengan hasil perhitungan dengan tanda pangkat wilcoxon yaitu di dapatkan nilai nilai Asymp. Sig. (2tailed) sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) dengan mengalami peningkatan sebesar 33%. Dan pada keuntungan di dapatkan nilai nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) hal ini berarti ada perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya pembiayaan atau meningkat sebesar 82%. Persepsi mudharib BPRS Binama tentang proses informasi pembiayaan, persyaratan, jaminan, verifikasi, pencairan, program credit review, dan penanganan pembiayaan bermasalah dinilai mudah, tepat waktu dan baik. Dan pembiayaan mudharabah dari BPRS Binama efektif untuk

perkembangan UMKM hal ini dilihat dari perbedaan pada modal kerja dari rata-rata sebesar Rp. 41.542.000,- sebelum mendapat pembiayaan menjadi rata-rata sebesar Rp. 66.720.000,- atau meningkat sebesar 165% setelah memperoleh pembiayaan. Pada omset penjualan meningkat dari rata-rata Rp. 15.086.000,- menjadi 26.980.000,- atau meningkat sebesar 79%. Untuk jumlah tenaga kerja meningkat sebesar 33% dan keuntungan terjadi peningkatan dari rata-rata Rp. 5.620.000,- menjadi Rp. 10.220.000,- atau meningkat sebesar 82%

8. Penelitian yang dilakukan oleh Lindia Watie dan Muzdalifah (2017) yang berjudul Persepsi Kelas Menengah Muslim Terhadap Dual Banking Sistem Dalam membentuk Kekuatan merek Perbankan syariah: yang menyatakan bahwa Penelitian ini menunjukkan dual banking system atau perbankan ganda belum sepenuhnya mampu membangun kekuatan IB sebagai lambang Islamic Bank, yang bermottokan “lebih dari sekedar bank”, meski ada pengaruh persepsi masyarakat kalangan menengah Muslim terhadap keberadaan dual banking system dalam membangun kekuatan merek perbankan syariah. Akan tetapi hanya bernilai 0,49 saja, korelasinya pun tergolong sedang dan positif, yang bermakna tidak begitu kuat namun tidak juga lemah. Artinya persepsi masyarakat tentang dual

banking system di masyarakat belum mengakar kuat dan menjangkau masyarakat kalangan menengah Muslim. Masyarakat menengah Muslim belum optimal merasakan manfaat dan kontribusi perbankan syariah dalam membangun perekonomian masyarakat. Meski persepsi kalangan menengah Muslim ini hanya berkontribusi sebesar 19 % dalam membangun kekuatan “Islamic bank (IB), lebih dari sekedar bank”, namun jumlah ini pada dasarnya bisa ditingkatkan, karena apabila jumlah persentase setuju dan sangat setuju pada pernyataan-pernyataan yang membangun harapan positif dijumlahkan maka nilainya melebihi 50 %, artinya lebih dari separuh responden sebenarnya memiliki harapan yang relatif tinggi terhadap keberadaan dual banking system menjadi tumbuh lebih baik dan besar. Pernyataan-pernyataan pandangan yang memiliki makna membangun harapan positif tersebut antara lain: Saya merasa aman dan nyaman bertransaksi menggunakan jasa Unit Usaha Syariah atau bank syariah dan Saya selalu mengharapkan dan membutuhkan jasa perbankan yang sesuai prinsip syariah dimana pun dan kapan pun. Masyarakat sebenarnya menginginkan perbankan syariah tumbuh besar dan mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan

bahwa dual banking system belum optimal membangun merek yang mengakar dalam pikiran masyarakat kalangan menengah Muslim. Merek “Islamic Bank (IB), lebih dari sekedar bank” belum mampu secara signifikan mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari jasa perbankan syariah yang berada dalam unit bank konvensional (UUS) ataupun yang berdiri sendiri dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS). Terbukti dari hasil penghitungan menggunakan analisis regresi sederhana bahwa nilai kekuatan merek perbankan syariah hanya naik sebesar 0,49 % apabila terjadi kenaikan 1 % persepsi kalangan menengah Muslim terhadap dual banking. Dibuktikan juga dari hasil korelasi (R) yang bersifat sedang dan positif, selanjutnya R<sup>2</sup> yang bernilai 19 % yang berarti bahwa faktor persepsi dari kalangan menengah Muslim terhadap dual banking system dalam membangun kekuatan merek Islamic Bank (IB) hanya sebesar 19 %. Akan tetapi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sebenarnya masyarakat kalangan menengah Muslim sangat berharap bahwa perbankan syariah dapat tumbuh meningkat secara signifikan dan mampu berperan dalam kehidupan sehari-hari mereka dimanapun dan kapan pun. Oleh sebab itu bank syariah harus bekerja lebih giat supaya bisa menjadi bank yang lebih baik dari

semua aspek. Untuk bisa menjadi bank yang melekat di hati masyarakat dibutuhkan usaha yang ekstra keras.

## **2.3 Kerangka Berfikir**

### **1. Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah**

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan masyarakat begitu penting karena apabila masyarakat sejahtera tentu akan berpengaruh pada kemajuan suatu negara, dalam hal ini aspek penting untuk menuju kesejahteraan masyarakat adalah dari segi ekonominya. Disini lembaga keuangan berperan sebagai pendukung untuk memajukan perekonomian masyarakat, dimana Bank adalah lembaga keuangan yang paling utama untuk menjadi sasaran masyarakat.

Kehadiran bank syariah dengan prinsip ke-Islamannya yang tidak mengenal riba bagaikan angin segar bagi dunia perekonomian Indonesia. Terlebih Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya keberadaan bank syariah sangat sesuai dengan kondisi tersebut. Bagi masyarakat yang beragama muslim tentunya tidak akan

ragu dalam melakukan transaksi di bank syariah. Meskipun berdasarkan prinsip Islam namun bank syariah tidak menutup diri terhadap masyarakat yang beragama non muslim. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keberadaan bank syariah adalah untuk melayani seluruh warga Indonesia yang memerlukan, tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu saja. Dengan demikian istilah bank Islam atau bank syari'ah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh pakar Islam yang mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Oleh karena itulah bank syari'ah menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya atau bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam dengan mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan hukum dan operasional.

## **2. Pengaruh Industri Kreatif Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah**

Industri kreatif terhadap eksistensi perbankan syariah di implementasikan melalui jumlah industri kreatif yang ada di sekitarnya. Semakin banyak industri kreatif di suatu daerah maka akan mempengaruhi eksistensi perbankan syariah karena

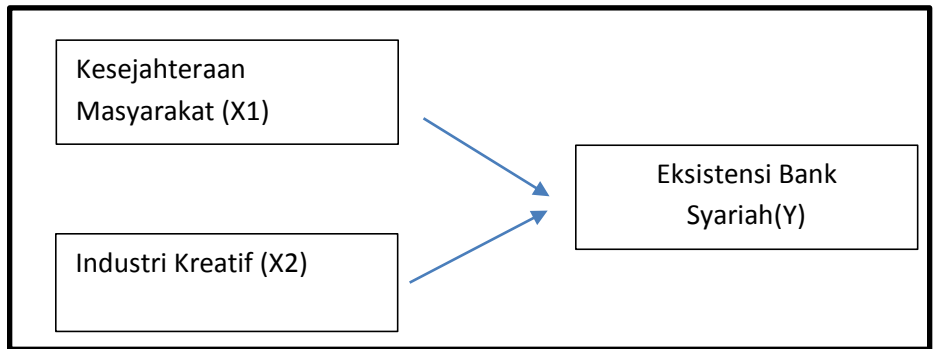


secara otomatis banyak pengusaha yang ingin mengajukan pembiayaan yang dalam ekonomi Islam diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamblik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam dan *istish'na*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujjrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pemberian kredit atau permodalan kepada pelaku usaha industri kreatif secara langsung akan mempengaruhi volum usaha bilamana hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika kredit tersebut digunakan untuk investasi atau untuk melakukan diversifikasi usaha, maka akan meningkatkan kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan menambah volum usaha. Pertambahan volum usaha tersebut akan dapat

meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha industri kreatif maupun tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir



## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari pertanyaan yang ada pada rumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara karena jawabana yang ada adalah jawaban yang berasal dari teori. Hipotesis dapat bersumber dari 2 hal yaitu hasil pengalaman masa lalu atau pengetahuan, dan teori atau model. Hipotesis penelitian ini mengenai eksistensi perbankan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat dan industri kreatif.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: kesejahteraan masyarakat diduga berpengaruh terhadap eksistensi perbankan syariah.

H0: kesejahteraan masyarakat diduga tidak berpengaruh terhadap eksistensi perbankan syariah.

H2: industri kreatif di duga berpengaruh terhadap eksistensi perbankan syariah.

H0: industri kreatif di duga tidak berpengaruh terhadap eksistensi perbankan syariah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif tipe penelitian *survey*. Jenis penelitian ini menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Muhammad Musa mendefinisikan penelitian *survey* yaitu pengamatan/penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan baik terhadap suatu persoalan di dalam suatu daerah tertentu.

##### **3.1.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada Masyarakat Jepara. Penelitian ini Insyaa Allah akan dimulai pada bulan Mei-Juli 2019 untuk melakukan uji coba terhadap instrumen penelitian sekaligus membagikan kuesioner, dilakukan analisis data dan penyusunan laporan penelitian.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan karakteristik masalah, yaitu penelitian studi kasus dan lapangan

(*Case and field study*). Dimana merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diamati/ diteliti.<sup>42</sup> Populasi penelitian ini meliputi penduduk Jepara pada tahun 2016 yang berjumlah 1.205.800.

#### **3.3.2 Sampel**

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Menurut Notoatmodjo (2010) *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu

---

<sup>42</sup> Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 133.

pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya.

Dengan demikian sampel masyarakat Jepara akan diambil sebesar 100 orang di Kabupaten Jepara yang tersebar di berbagai sentra industri kreatif di Jepara meliputi.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Pengertian Data**

Penelitian membutuhkan data-data yang akan dianalisis, diolah, dan diuji untuk dapat menjawab rumusan masalah sebuah penelitian. Data adalah bahan mentah yang perlu proses pengolahan sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menghasilkan sebuah fakta. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang relevan bagi penelitian untuk mengumpulkan data-data di lapangan.

#### **3.4.2 Sumber data dan jenis data**

Data primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri dari sebuah sumber untuk kepentingan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dalam penelitian ini diperoleh

dengan mengumpulkan data secara langsung dari hasil penyebaran kuesioner.

### **3.4.3 Teknik pengumpulan data**

#### **1. Angket/Kuisisioner**

Angket/kuisisioner adalah mengumpulkan data dengan cara melakukan penyebaran lembar pertanyaan/pernyataan secara tertulis tentang suatu fakta atau kebenaran yang diketahui oleh subyek untuk mengetahui pendapat/persepsi responden tentang suatu variable yang diteliti. Dengan angket ini peneliti dapat mengetahui hal-hal yang tidak dapat diketahui secara langsung. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner tertutup karena pilihan jawaban sudah disediakan.<sup>43</sup> Data yang diperoleh dari kuisisioner ini tentang pengaruh kesejahteraan masyarakat dan industry kreatif terhadap eksistensi perbankan syariah.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah cara mendapatkan data dengan dialog langsung antara peneliti dan responden. Hasil wawancara direkam secara tertulis atau menggunakan alat

---

<sup>43</sup> Azuar Juliandi, Ifar, Saprial Manarung, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi: Sukses Menuju Skripsi*, Medan: UMSU Press, 2014, hlm 69



perekam oleh peneliti. Hasil wawancara langsung dengan masyarakat peneliti mencari data tentang pengaruh kesejahteraan masyarakat, industri kreatif dan eksistensi perbankan syariah di Jepara.

### 3.5 Definisi Konsep dan Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran variabel terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Dalam penelitian ini, indikator-indikator variabel tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Variabel dan Indikator Penelitian**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukur
1	Variabel Kesejahteraan Masyarakat(X1)	Kesejahteraan Masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan materiil , spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak.	a. Terpenuhinya kebutuhan spiritual b. Terpenuhinya kebutuhan material c. Terpenuhinya kalkulasi sarana dan tujuan nasabah	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert 1-5
2	Variabel Industri Kreatif (X2)	Industri Kreatif adalah industri yang berasal	a. Jumlah industri kreatif	Diukur melalui angket

		dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Meningkatnya volum usaha industri kreatif</li> <li>c. Lama usaha Industri Kreatif</li> </ul>	dengan menggunakan skala likert 1-5
3	Variabel Eksistensi Perbankan Syariah (Y)	Eksistensi Perbankan Syariah adalah keberadaan lembaga keuangan (Bank) yang kegiatannya mengacu pada hukum islam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui bank syariah</li> <li>b. Bank syariah melakukan sosialisasi untuk menambah eksis di kalangan masyarakat</li> <li>c. Letak bank syariah yang mudah dijangkau</li> <li>d. Menggunakan bank syariah untuk transaksi sehari-hari</li> </ul>	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert 1-5

### **3.6 Instrumen Penelitian**

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang telah ditentukan (pengamatan, wawancara, angket/kuisisioner). Validitas dan reliabilitas harus diperhatikan supaya instrument dapat berfungsi secara efektif. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuisisioner yang memuat daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian.

### **3.7 Uji Instrumen Penelitian**

#### **3.7.1 Uji Kualitas Data**

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliabel sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian.

##### **3.7.1.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan

dengan total skor. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya. Dalam uji validitas digunakan perhitungan koefisien korelasi *Product Moment Pearson*, atau koefisien korelasi *Pearson*.<sup>44</sup>

### **3.7.1.2 Uji Reabilitas**

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Cara menghitung tingkat reliabilitas data yaitu menggunakan rumus *Crobach's Alpha*.<sup>45</sup>

## **3.8 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis, karena pengujian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji serta memastikan kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, dimana variabel tersebut terdistribusi secara normal, bebas dari multikolonieritas, dan

---

<sup>44</sup> Ronald Arisetiawan, “Analisis Persepsi Akuntan Publik dan Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2010),h. 37.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 38.

heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

### **3.8.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki data berdistribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (uji *Kolmogorof Smirnov*). Dalam analisis grafik, dasar pengambilan keputusan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi

tidak memenuhi asumsi normalitas. Dalam uji statistik (uji *Kolmogorov Smirnov Z* (1-Sample K-S)) dasar pengambilan keputusan untuk pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai *Asymp. Sig.* (2-tailed) kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- b. Apabila nilai *Asymp. Sig.* (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

### **3.8.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Menurut Ghozali,<sup>46</sup> untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi biasanya dilihat dari

---

<sup>46</sup> Imam ghozali, *aplikasi analisis multivariate degan programi spss* (edisi 5; semarang: bp universitas diponegoro, 2011), h. 184

nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik.
2. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF di atas 10, maka terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut tidak baik.

### **3.8.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, dan pada penelitian ini diuji dengan Gleyser. Dasar analisis uji heteroskedastisitas<sup>47</sup> adalah sebagai berikut :

---

<sup>47</sup>Ibid. Imam ghozali. h. 185

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### **3.9 Uji Koefisien Regresi Linier Berganda**

Analisis Regresi Linear Berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Variable independen yang terdiri dari kesejahteraan masyarakat dan industri kreatif yang memberi pengaruh terhadap variabel dependen, dalam hal ini yaitu eksistensi perbankan syariah. Variabel dependen yang dinyatakan dalam interval dan variabel independen yang lebih dari satu, sehingga persamaan regresinya adalah sebagai berikut:



$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Eksistensi Perbankan Syariah
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2$  = Koefisien Regresi
- $X_1$  = Kesejahteraan Masyarakat
- $X_2$  = Industri Kreatif
- $\varepsilon$  = Variabel Gangguan

Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda, untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

### **3.10 Uji Hipotesis**

#### **3.10.1 Uji T (Pengujian Secara Parsial)**

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara sendiri-sendiri/individual. Pengujian ini dilakukan secara parsial untuk masing-masing variabel bebas dengan tingkat kepercayaan tertentu. Kita dapat menguji pengaruh positif variabel X terhadap variabel Y dengan kriteria uji  $H_0$  ditolak jika  $t > t_a$ . Sebaliknya kita dapat melakukan uji negatif dengan kriteria  $H_0$  ditolak jika  $t < -t_a$ . Nilai signifikansi telah ditentukan sebelumnya bahwa  $\alpha = 0.05$ . Pengaruh uji t juga dapat dilakukan

menggunakan *software* SPSS. Penarikan kesimpulan dapat dilihat pada output *coefficient* kolom t hitung baris variabel X dan kolom Sig. Jika  $\text{Sig} < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak dan sebaliknya.<sup>48</sup>

### 3.10.2 Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen (X) secara bersama dapat mempengaruhi variabel dependen (Y). Jika  $H_0$  diterima maka dapat ditarik kesimpulan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. sebaliknya, jika  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Taraf signifikansi  $\alpha$  yang ditetapkan adalah 0.05. Uji F dapat dilihat kesimpulannya dari perbandingan F hitung dan F tabel.  $H_0$  ditolak jika  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  sedangkan  $H_0$  diterima jika  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ .

Pengujian pengaruh variabel X terhadap variabel Y juga dapat dilakukan dengan program komputer SPSS. Penarikan kesimpulan uji F ini dapat dilihat dengan cara membandingkan kolom Sig dengan taraf signifikansi  $\alpha$  yang telah ditentukan

---

<sup>48</sup> Suyono, *Analisis Regresi untuk Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 71-74

sebelumnya. Ketentuannya adalah  $H_0$  ditolak jika  $\text{Sig} < \alpha$  dan  $H_0$  diterima jika  $\text{Sig} > \alpha$ .<sup>49</sup>

### 3.10.3 Uji $R^2$ (Koefisien Determinasi)

Uji  $R^2$  digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X). Koefisien determinasi mengukur tingkat ketepatan variabel X terhadap variabel Y. Nilai  $0 \leq R^2 \leq 1$  dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ❖  $R^2 = 0$  dapat diartikan tidak ada hubungan antara X dan Y
- ❖  $R^2 = 1$  dapat diartikan jika terdapat hubungan antara X dan Y

Semakin dekat  $R^2$  dengan nilai 1 maka semakin cocok garis regresi yang terbentuk untuk variabel Y. Perlu diperhatikan bahwa semakin banyak variabel penjelas maka semakin meningkat nilai  $R^2$ .<sup>50</sup> Melalui koefisien detrminasi dapat diketahui seberapa jauh suatu variabel bebas menentukan sebuah variabel terikat. Nilai koefisien determinasi terletak antara nol dan satu. Kesimpulan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat di sajikan dalam bentuk persentase.

---

<sup>49</sup> Ibid, Suyono, hlm.66.

<sup>50</sup> Dergibson Siagian Sugiarto, *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm.259.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

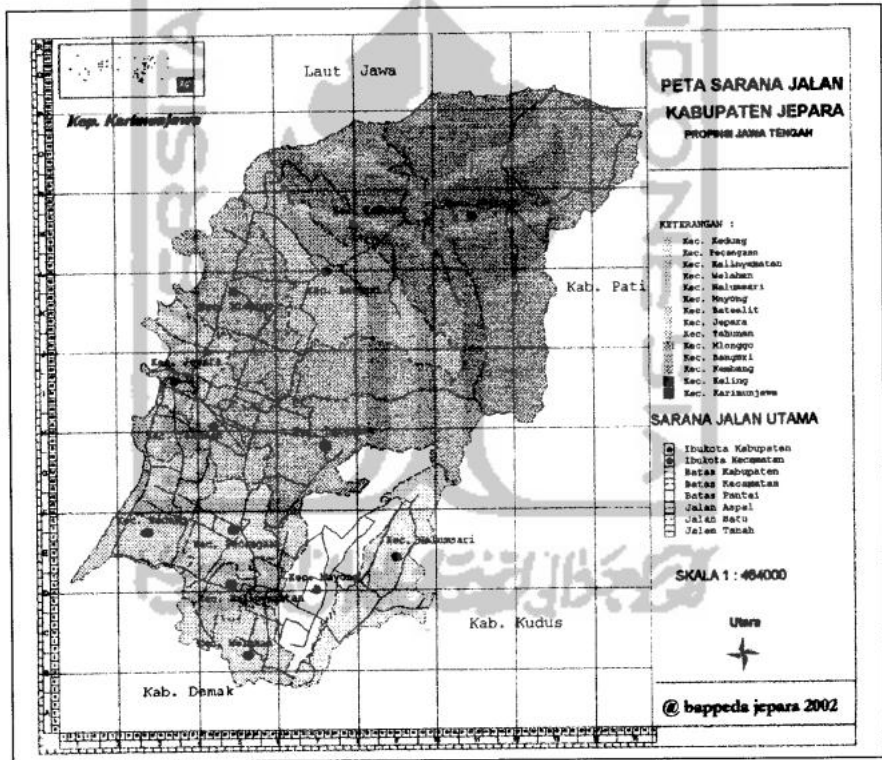
#### **4.1 Gambaran Umum Masyarakat Jepara**

Kabupaten Jepara terletak di ujung utara Pulau Jawa. Nama Jepara berasal dari kata Ujung Mara dan Jumpara, yang berarti sebuah tempat pemukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah. Secara astronomis, Kabupaten Jepara terletak antara 50° 43' 20,67" sampai 60° 47' 25,83" Lintang Selatan dan 110° 9' 48,02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur. Sebelah barat dan utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati, serta sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Kabupaten Jepara memiliki ketinggian antara 0-1.301 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Jepara memiliki wilayah seluas 1.004,13 km<sup>2</sup> yang terdiri dari tanah sawah seluas 265,82 km<sup>2</sup> atau sebesar 26 persen dan tanah kering seluas 738,32 km<sup>2</sup> atau sebesar 74 persen. Topografi tanah di Kabupaten Jepara bervariasi mulai dari dataran tinggi di sekitar Gunung Muria dan Clering sampai dataran rendah dan memiliki garis pantai sepanjang 82,73 km yang memanjang dari sebelah selatan ke utara termasuk Kepulauan Karimunjawa. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Jepara mempunyai sumber daya alam yang cukup

melimpah. Kabupaten Jepara memiliki 2 desa yang berada di daerah lembah/daerah aliran sungai, 22 desa berada di lereng punggung bukit, 137 desa di daerah dataran, dan 34 desa di daerah pantai.

Gambar 4.1  
Peta Kondisi Fisik Kabupaten Jepara



Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara per Desember 2018 tercatat sebanyak 976.767 jiwa.terdiri dari 490.106 jiwa laki - laki ( 50,18%) dan 486.661 jiwa perempuan (49,82%). Budaya masyarakat Kabupaten Jepara pada umumnya memiliki etos kerja yang tinggi dan jiwa kewirausahaan yang besar. Budaya masyarakat ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari perkembangan industri kecil/kerajinan rumah tangga dan kegiatan perdagangan yang cukup pesat.

#### **4.1.1** Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jepara

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Di bawah ini adalah uraian statistik rakyat Kabupaten Jepara:

## 1. Pemerintahan

Wilayah Kabupaten Jepara terbagi menjadi 16 kecamatan dan 195 desa/kelurahan, terdiri dari 11 kelurahan dan desa sebanyak 184, Jumlah RW 1.015 dan Rt sebanyak 4.766.

Pada Tahun 2017 Jumlah Akte Kelahiran yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 28.670, Akte Kematian 4.447 dan Akte Perkawinan 317.

Anggota DPRD Kabupaten Jepara berjumlah 50 orang yang terbagi dalam tujuh fraksi, yaitu fraksi PDI-P, fraksi PPP, fraksi Gerindra, fraksi ADES (Amanat Demokrasi Sejahtera), fraksi Nasdem Nurani Rakyat, fraksi Golkar, dan fraksi PKB. Fraksi PDI-P menduduki kursi terbanyak, yaitu sebanyak 10 kursi, disusul fraksi PPP sebanyak 9 kursi. Fraksi Gerindra menempati 8 kursi. Fraksi ADES menempati 7 kursi. Fraksi Nasdem Nurani Rakyat menempati 6 kursi. Fraksi Golkar dan PKB masing-masing menempati 5 kursi. Sepanjang tahun 2017, DPRD Kabupaten Jepara mengadakan rapat Koordinasi Konsultasi sebanyak 68 kali diantaranya pleno / koordinasi sebanyak 9 kali, rapat paripurna 37 kali dan rapat audiensi / dengar pendapat sebanyak 22 kali.



Pada Tahun 2017, jumlah Aparatur Negeri Sipil (ASN) di Kabupaten Jepara sebanyak 8.349 yang terdiri dari 4.232 Laki-laki dan 4.117 Perempuan. Jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai, paling banyak pegawai berpendidikan sarjana keatas sebanyak 5.595, kemudian Pendidikan SMA Sederajat sebanyak 1.522, sedangkan yang paling sedikit adalah pendidikan dibawah SLTP yaitu sebanyak 61 orang.

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaan pembangunan atau belanja daerah. Pada tahun 2017, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jepara mencapai 2.170,60 milyar rupiah, dimana 60,66 persennya bersumber dari dana perimbangan, 24,09 persen bersumber dari penerimaan lain-lain, dan hanya 15,25 persen yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jepara pada tahun 2017 sebesar 311,06 milyar rupiah, mengalami sedikit peningkatan sebesar 2.65 persen dibanding tahun sebelumnya.

Jumlah anggaran yang dibelanjakan oleh pemerintah Kabupaten Jepara meningkat sebesar 2.67 persen, dari 2.157,97 milyar rupiah pada tahun 2016 menjadi 2215,49 milyar rupiah pada tahun 2017.

Komponen belanja daerah terdiri dari belanja pegawai sebesar 825,24 milyar rupiah, belanja barang dan jasa sebesar 572,18 milyar rupiah, belanja modal sebesar 404,34 milyar rupiah.

## 2. Ketenagakerjaan

Angkatan kerja merupakan penduduk berumur lima belas tahun ke atas yang berpotensi untuk bekerja. Tidak termasuk dalam angkatan kerja yaitu ibu rumah tangga dan anak sekolah. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Jepara pada tahun 2017 tercatat sebesar 69,85 persen, naik 1.72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Semakin rendah nilai TPAK semakin rendah pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk menunjang perekonomian di Kabupaten Jepara.

Tingkat kesempatan kerja (TKK) di Kabupaten Jepara pada tahun 2017 tercatat sebesar 95,16 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 96,88 persen. Hal ini artinya kesempatan seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk dapat bekerja atau terserap dalam pasar kerja semakin sedikit sehingga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka (TPT)

sebesar 4,84 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3,13 persen.

Komposisi lapangan usaha pekerjaan utama di Kabupaten Jepara masih didominasi oleh sektor industri yang pada tahun 2017 ini persentasenya mencapai 44 persen. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan sebesar 18 persen, sektor pertanian sebesar 14 persen, sektor jasa sebesar 12 persen, dan yang bekerja di sektor-sektor lainnya sebesar 12 persen.

### 3. Tingkat Pendidikan

Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Jepara usia 7 tahun ke atas pada tahun 2017 sebesar 12,57 tahun. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 12,45 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Jepara diharapkan minimal lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) hal ini sesuai program pemerintah wajib belajar 12 tahun Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Jepara mencapai 7,33 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP. Walaupun selama tiga tahun terakhir angka ini cenderung meningkat, tetapi masih belum mencapai keberhasilan dari program pemerintah wajib belajar 12 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok umur yang bersangkutan. Semakin tinggi APM berarti banyak anak pada kelompok umur tertentu yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Pada tahun 2017 dari menunjukkan bahwa APM SD/MI mencapai 97,02 persen artinya bahwa 97,02 persen penduduk umur 7-12 tahun masih bersekolah di SD/MI. Sementara APM untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA adalah masing-masing 78,80 persen dan 57,70 .

Indikator lain yang menunjukkan kemajuan di bidang pendidikan yaitu Angka Partisipasi Sekolah. APS menunjukkan besaran penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. APS merupakan ukuran daya serap, pemerataan, dan akses terhadap pendidikan, khususnya penduduk usia sekolah. APS tertinggi terjadi pada kelompok usia muda (7-12 tahun) dan cenderung menurun pada kelompok usia yang lebih tua (16-18 tahun).

Pada tahun 2017, APS penduduk usia 7-12 tahun mencapai 99,87 persen, APS penduduk usia 13-15 tahun tercatat sebesar 94,64 persen, dan penduduk usia 16-18 tahun sebesar 66,33 persen.

Kualitas pendidikan berkaitan erat dengan fasilitasnya, dimana salah satu indikatornya adalah rasio murid-guru, yaitu rasio yang menggambarkan beban seorang guru dalam mengajar sekelompok murid. Di Kabupaten Jepara, rasio murid-guru pada tahun 2017 untuk tingkat SD sebesar 17,60 yang artinya seorang guru rata-rata mengajar 18 orang murid. Sedangkan rasio murid-guru untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK masing-masing sebesar 17,98; 16,63; dan 17,97. Semakin kecil rasio murid guru, maka proses belajar mengajar semakin baik.

#### 4. Kesehatan

Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai yang meliputi tempat berobat maupun tenaga kesehatan akan menunjang tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Sebagian besar penduduk Jepara lebih memilih berobat ke tempat praktek dokter dan di Puskesmas, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tempat pelayanan kesehatan di puskesmas mengalami

kenaikan, sedangkan di tempat praktek dokter/bidan mengalami sedikit penurunan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Jepara lebih memilih petugas kesehatan seperti praktek dokter/bidan sebagai rujukan untuk berobat jalan. Hal ini karena para petugas kesehatan tersebut bertempat tinggal di tengah-tengah masyarakat sehingga akses untuk berobat lebih mudah. Persentasenya mencapai 62,23 persen di tahun 2017. Sedangkan yang memilih berobat ke Puskesmas sebesar 23,38 persen.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melahirkan dengan bantuan tenaga medis demi keselamatan ibu dan bayi tergolong cukup berhasil. Tercatat pada tahun 2017 persentase ibu yang melahirkan dengan bantuan bidan semakin naik yaitu sebesar 2,96 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017,

##### 5. Perumahan

Perumahan dan berbagai fasilitasnya yang berkaitan dengan lingkungan adalah salah satu indikator kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Jepara menempati bangunan rumah dengan luas antara 50 m<sup>2</sup> sampai dengan 99 m<sup>2</sup> meter persegi dan hanya sebagian kecil saja yang

menempati rumah dengan luas kurang dari 20 meter persegi.

Pada tahun 2017, rumah tangga dengan luas bangunan rumah lebih dari 50 m<sup>2</sup> sampai dengan 99 m<sup>2</sup> tercatat sebanyak 60,19 persen sedangkan yang menempati rumah dengan luas kurang dari 20 meter persegi hanya sebesar 0.36 persen.

Tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017 sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Jepara masih menggunakan air sumur sebagai sumber utama air minum dengan persentase mencapai hampir 43,53 persen. Sedangkan yang menggunakan air kemasan bermerk atau isi ulang tercatat sebesar 14,24 persen, sisanya 42,23 persen menggunakan air ledeng dan sumber-sumber lainnya.

Kesadaran masyarakat Jepara akan pentingnya sanitasi lingkungan, yang salah satunya yaitu kesadaran akan pentingnya memiliki tempat buang air besar sendiri harus terus ditingkatkan. Pada tahun 2017, rumah tangga yang tidak memiliki tempat buang air besar persentasenya masih sebesar 7,63 persen.

## 6. Pembangunan Manusia

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPM merupakan indikator komposit yang dibentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari Rata-rata Lama Sekolah dan Rata-rata Harapan Lama Sekolah serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui pengeluaran per kapita.

Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2015-2017 berada di kisaran 75,68 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Jepara usia 15 tahun keatas pada tahun 2017 yaitu 7 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP. Sedangkan lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak pada tahun 2017 yaitu 12 tahun atau setara dengan kelas 3 SMA. IPM Kabupaten Jepara pada tahun 2017 sebesar 70,79. Capaian IPM Kabupaten Jepara pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM



Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 70,52. Akan tetapi capaian ini masih di bawah Kabupaten Kudus sebagai kabupaten terdekat dengan Jepara yang mencapai 73,84. Capaian IPM yang meningkat dari tahun ke tahun perlu mendapat apresiasi karena menunjukkan bahwa penduduk Jepara semakin sehat, semakin berpendidikan, dan semakin sejahtera.

#### 7. Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah. Dengan berbagai program pro rakyat, pemerintah berusaha keras menurunkan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Jepara pada tahun 2017 mengalami penurunan, baik secara persentase maupun jumlahnya. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebanyak 99 ribu orang, berkurang sedikit dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 100,32 ribu orang. Sedangkan secara persentase, dari 8,35 persen di tahun 2016 turun menjadi 8,12 persen penduduk miskin di tahun 2017.

Penduduk yang dikategorikan miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2017, garis kemiskinan Kabupaten Jepara sebesar 355.607

rupiah/kapita/bulan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 341.754 rupiah/kapita/bulan. Garis kemiskinan Kabupaten Jepara sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Rembang yang sebesar 354.440 rupiah/kapita/bulan. Kabupaten Pati memiliki garis kemiskinan yang tertinggi sedangkan Kabupaten Blora memiliki garis kemiskinan terendah.

Nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) semakin bagus jika nilainya mendekati nol yang artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Pada tahun 2017, nilai P1 sebesar 0,98 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 0,68. Hal ini patut menjadi perhatian karena menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin, tidak dibarengi dengan semakin kecilnya nilai indeks kedalaman kemiskinan.

## 8. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi merupakan salah satu indikasi stabilitas ekonomi. Inflasi ibarat vitamin bagi pembangunan, jika ada dalam jumlah yang tepat maka akan menjadi hal yang positif untuk menggerakkan roda ekonomi. Laju inflasi yang terlalu

tinggi atau terlalu rendah akan berdampak pada dinamika ekonomi. Pada tahun 2017, penghitungan Indeks Harga Konsumen sebagai dasar penghitungan inflasi menggunakan tahun dasar 2012. Inflasi di tahun 2017 tercatat sebesar 2,83 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3,45 persen. Tingkat inflasi Kabupaten Jepara lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Laju inflasi bulanan pada tahun 2017 terlihat sangat berfluktuasi. Inflasi tertinggi sebesar 1,43 persen terjadi pada bulan Juni. Sedangkan deflasi terendah sebesar -0,41 persen terjadi pada bulan Agustus. Bila dilihat menurut penyebabnya, menurunnya stabilisasi tingkat harga di Kabupaten Jepara pada tahun 2017 disebabkan oleh kelompok perumahan, transportasi, dan pendidikan, hal ini ditunjukkan oleh tingginya laju inflasi kelompok pengeluaran tersebut yang masing-masing sebesar 6,46 persen, 1,72 persen, dan 1,65 persen. Inflasi terendah terjadi di kelompok makanan jadi yaitu sebesar 0,79 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran kesehatan mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.

## 9. Perdagangan

Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 664 eksportir di Kabupaten Jepara yang melakukan ekspor ke 290 negara tujuan, eksportir komoditas Furniture sebanyak 398 dan dikirim ke 111 negara tujuan, eksportir komoditas kapok/produk nabati sebanyak 5 dan dikirim ke 10 negara tujuan, eksportir komoditas produk garmen sebanyak 13 dan dikirim ke 32 negara tujuan, eksportir komoditas kayu olahan sebanyak 83 dan dikirim ke 31 negara tujuan, Perkembangan ekspor Kabupaten Jepara selama kurun waktu lima tahun terakhir sangat fluktuatif, dimana nilai ekspor meningkat sepanjang periode tahun 2013-2017. Nilai ekspor tahun 2017 tercatat sebesar 278,89 juta US dollar, mengalami peningkatan sebesar 24,17 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016, atau sebesar 62,85 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015. Mebel ukir atau furniture dari kayu masih mendominasi permintaan pasar internasional dengan persentase mencapai 59,83 persen dari total nilai ekspor pada tahun 2017 atau sebesar 166,86 juta US dollar. Selain mebel ukir, komoditas ekspor lainnya pada tahun 2017 yaitu produk garmen dengan nilai mencapai 80,68 juta US dollar, textile dan produk textile dengan nilai mencapai 6,43 juta US dollar. Namun jika dibandingkan tahun sebelumnya ada

penurunan nilai ekspor furniture dari kayu sekitar 4 %, sedangkan produk yang mengalami peningkatan drastis dari tahun sebelumnya adalah produk garmen dan menyumbang 28,93 persen dari total nilai ekspor.

#### 10. Pendapatan Regional

PDRB merupakan nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di suatu wilayah dalam satu tahun.

Nilai PDRB Kabupaten Jepara pada tahun 2017 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Jepara tetapi masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga atau inflasi. Pada tahun 2017 persentase kenaikannya nilai PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar 8,09 persen dibanding dengan tahun 2016.

Sedangkan peningkatan produksi barang dan jasa secara riil tanpa dipengaruhi faktor inflasi dicerminkan oleh kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Peningkatan produktivitas riil ini merupakan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara sebesar 5,13 persen,

mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 5,02 persen.

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Jepara tahun 2017 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 21.146 ribu rupiah.

Tiga pilar penting penyangga perekonomian Kabupaten Jepara dipegang oleh kategori industri pengolahan (C) sebesar 34,56 persen, disusul oleh kategori perdagangan dan reparasi mobil sepeda motor (G) sebesar 16,09 persen, dan kategori pertanian, kehutanan, perikanan (A) sebesar 13,94 persen.<sup>51</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa : kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan dan 195 desa, lapangan pekerjaan yang paling banyak adalah di sektor industri yaitu sebesar 44% disusul perdagangan, pertanian, jasa dan lainnya. Rata-rata lama sekolah penduduk kabupaten Jepara mencapai 7,33 tahun atau setara dengan SMP, dari 3 tahun terakhir angka terus meningkat namun belum mencapai program pemerintah

---

<sup>51</sup> Badan Pusat Statistik Jepara. 2018. Jepara: Badan Pusat Statistik Jepara

wajib 12 tahun . Kemudian, angka partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun sebesar 98,87%.

Dilihat dari segi kesehatan, masyarakat kabupaten jepara yang berobat ke puskesmas mengalami peningkatan sebesar 2,96% dari tahun sebelumnya, kemudian dari segi rumah yang menggunakan air sumur sebagai sumber air menurun sebaliknya , rumah yang menggunakan air ledeng meningkat. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari tahun 2015-2017 yaitu 70,02%, 70,25%, dan 70,79%. Hal ini perlu mendapat apresiasi karena menunjukkan bahwa penduduk Jepara semakin sehat, semakin berpendidikan, dan semakin sejahtera. Kemudian penduduk miskin Kabupaten Jepara juga menurun sebesar 0,23% dari tahun sebelumnya, dengan garis kemiskinan sebesar 355,607 rupiah/kapita/bulan.

Tingkat Inflasi kabupaten Jepara tahun 2017 sebesar 2,83% dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jepara sebesar 5,13%. Kemudian jumlah ekportir perdagangan tahun 2017 sebanyak 664 dan 290 negara tujuan. Perkembangan ekspor kabupaten jepara juga sangat berfluktuatif dimana tingkat ekspor meningkat sepanjang priode 2013-2017. 3 pilar penyangga

perekonomian kabupaten Jepara dipegang oleh kategori industry pengolahan sebesar 34,56%, perdagangan dan reparasi mobil , sepeda motor sebesar 16,09% dan terakhir kategori pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 13,94%.

#### **4.1.2 Industri Kreatif di Kabupaten Jepara**

Jepara merupakan salah satu kota yang menyimpan berjuta potensi, Jepara merupakan kota yang sangat layak untuk disinggahi. Letak geografisnya yang berada di Semenanjung Muria dan cenderung menjorok ke laut, menjadikan Jepara merupakan satu-satunya Kabupaten paling eksotis di Jawa Tengah. Dahulunya Jepara merupakan jalur utama transmisi peradaban dan perdagangan dari luar menuju pulau Jawa. Sejarah panjang yang dilalui kota Jepara merupakan cerita menarik yang tak kan habis untuk dibahas. Sejumlah penguasa pernah tercatat memerintah dengan berpusatkan kota ini, semisal dalam sejarah pulau Jawa pada millennium pertama, ratu Shima (640) sang penguasa beragama Hindu dari Kerajaan Kalingga. Konon kerajaan sang ratu yang terkenal sangat adil, tegas dan bijaksana ini dahulu berada di wilayah Keling (Holing). Kemudian terdapat pula Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono (1549-1579), penguasa yang sangat gigih dan berani



dalam memerangi penjajah portugis. Bersama suaminya Sultan Hadlirin mendirikan sebuah masjid yang tercatat masjid tertua kedua di Jawa setelah masjid Demak. Konon pula cikal bakal seni ukir Jepara yang tersohor di seluruh dunia hingga saat ini bermula dari tempat ini, Mantingan. Ini terbukti dengan keberadaan relief ukir di atas media batu kapur yang sekarang masih tertempel pada dinding Masjid Astana sultan Hadlirin Mantingan. Selain itu terekam pula dalam sejarah mengenai beberapa penguasa masyhur lain yang pernah memerintah Jepara. Sebut saja Pati Unus (1507-1521 M), faletahan/ Fatahillah (1521-1536 M), Sultan Trenggono dan sebagainya.

Berikut ini adalah Sentra Industri Kreatif di Jepara :

1. Sentra Industri Ukir dan Patung

Ukiran adalah kerajinan utama dari kota jepara. Ukiran dari kayu di Jepara ini produksinya ada tempat-tempat yang lekat dengan para ahli pahat ukir Jepara sebagai *centre of production* yaitu Desa Mulyoharjo untuk pusat kerajinan ukir dan patung Jepara. Yang dimaksud di sini adalah ukiran yang berasal dari kayu seperti kayu jati, mahoni, sengon dan lain-lain. Menurut sejarah mengapa masyarakat jepara mempunyai keahlian dipahat ukir kayu? Karena konon pada jaman dahulu kala ada seorang

seniman hebat yang bernama Ki Sungging Adi Luwih, ia tinggal di kerajaan Kepingawaian. Ki Sungging ini terkenal dan sang rajapun akhirnya mengetahuinya. Singkat cerita raja bermaksud memesan gambar untuk permaisurinya kepada Ki Sungging. Beliau bisa menyelesaikan gambarnya dengan baik namun pada saat Ki Sungging hendak menambahkan car hitam pada rambutnya, ada cat yang tercecer di ambar permaisuri tersebut, bagian paha sehingga Nampak seperti tahi lalat. Kemudian diserahkan kepada raja dan raja sangat kagum dengan hasil karyanya. Namun takdir berkata lain sang raja curiga kepada Ki Sungging karena raja berfikir kalau Ki Sungging pernah melihat permaisuri telanjang karena adanya gambar tahi lalat pada pahanya. Akhirnya raja menghukum Ki Sungging dengan membawa alat pahat untuk membuat patung permaisuri di udara dengan naik layang-layang. Sejarah singkat itulah yang membuat masyarakat Jepara mempunyai keahlian mengukir kayu.

## 2. Sentra Industri Tenun Troso

Keanggunan bumi kartini tak hanya terpancar dari ukiran-ukiran di kerajinan kayu jatinya. Keindahan dan keunikan lainnya dapat kita temui di sebuah desa Troso kecamatan Pecangaan, sekitar 15 km dari Kota Jepara.

desa Troso merupakan desa penghasil kerajinan tenun ikat yang sengaja dinamakan sama dengan tempatnya dibuat yaitu tenun Troso. Kain ini termasuk kain unik karena Homemade, dan corak kainnya yang menarik. Hamper setiap rumah disana adalah pengrajin kain Troso.

### 3. Sentra Industri Rotan dan Anyaman

Jepara mempunyai pusat industri kerajinan anyaman rotan yang berada di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan. Desa ini terletak di bagian Selatan kabupaten Jepara, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak. Sentra kerajinan rotan ini sudah berdiri sejak tahun 1970-an sejarahnya ada tiga orang warga desa teluk Wetan mendapat kesempatan mengikuti pelatihan di Filipina dari pemerintah untuk belajar seluk beluk kerajinan rotan. Sekembalinya ke Jepara, mereka kemudian menyebarkan ilmu yang mereka dapatkan dan mengajarkan warga desa bagaimana membuat anyaman rotan yang berkembang turun-menurun hingga sekarang. Sejak 1990 pemerintah meresmikan Desa Teluk Wetan sebagai sentra kerajinan rotan. Saat ini hamper 90% warga desa berprofesi sebagai perajin rotan. Ada sekitar 50 kios rotan di desa ini, sejak itulah Desa teluk Wetan menjadi

Sentra kerajinan anyaman rotan terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Terangsan, Surakarta.

#### 4. Sentra Industri Monel

Beragam perhiasan cincin, gelang dan kalung tertata di etalase toko perhiasan itu berwarna putih, berbahan baja putih yang oleh masyarakat setempat disebut monel. Selain perhiasan, di sana dipajang aneka kerajinan berbahan monel. Kerajinan tersebut antara lain: aksesoris , alat pijat refleksi, kerokan, penggaruk punggung dan lain-lain. Sentra kerajinan monel terletak di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Jepara. melihat seni kerajinan monel di Desa Kriyan terbentang kesetiaan pada seni warisan leluhur yang diperlihatkan dan dikembangkan. Berkat kerja keras pengrajinnya, kini monel menjadi kerajinan yang meluas ke berbagai daerah lain. Menurut H. Abdur Rohim, pemilik gerai Sinar Sakti Monel, yang bangunannya paling megah di sekitar sentra monel. Kala itu sebagian besar yang dibuat adalah cincin, baik cincin untuk laki-laki maupun perempuan. Saat remaja, Abdur kerap mengambil beragam cincin dari pengrajin, kemudian menjajakannya ke berbagai kota. Berawal dari pedagang kaki lima yang mencoba mengenalkan monel itu apa , hingga lama lama banyak

yang menyukainya karena harganya terjangkau , lebih murah dari logam lainnya.

#### 5. Kerajinan Mainan anak-anak

Desa Karanganyar pada mulanya bernama desa Ngemplek. Desa ini dulunya hutan belantara dan tidak memiliki penghuni. Seiring berjalannya waktu, penduduk mulai berdatangan dan menghuni desa Ngemplek. Penduduk pada zaman dahulu membuka hutan dan bercocok tanam untuk penghidupan sehari-hari. Almarhum mbah Dzaru dan almarhumah Mbah Surti mengganti nama Desa Ngemplek menjadi Desa Karangayar sampai sekarang.

Desa Karanganyar adalah desa penghasil mainan tradisional Anak-anak terbesar se-Indonesia, oleh karena itu Desa Karangayar sekarang menjadi Sentra Industri Kerajinan Mainan Anak. Produk dari desa Karanganyar membanjiri pasar nasional dan banyak permintaan dari luar negeri. Maka pemasaran mainan tradisional anak-anak ini diekspor ke berbagai Negara, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, China, Jepang, Amerika, dll.

#### 6. Industri Kue dan Roti

Sentra industri roti di Jepara berada di desa Bugo kecamatan Welahan sekitar 30 km dari pusat kota Jepara.

Menurut sejarah, kegiatan memproduksi roti yang ada di desa ini sudah berlangsung sejak tahun 1970-an. Pada awalnya kue dan roti yang di produksi berupa roti bolang baling, moho, roti manis dan untir-untir. Namun pemasaran produk roti dari desa Bugo kala itu terbilang sulit karena masyarakat masih asing dengan produk roti yang diproduksi desa ini sehingga usaha roti di desa ini kurang berkembang. Namun dengan ketekunan dan kesabaran para pengusaha kue dan roti di desa Bugo dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya, sekarang pemasaran Industri roti Bugo berkembang pesat. Kini, dalam memasarkan produknya masyarakat produsen kue dan roti tidak perlu memasarkan sendiri ke konsumen, melainkan ada pedagang yang mengambil langsung ke pusat produk di desa Bugo ini untuk dipasarkan ke kota seperti kota Kudus, Pati, Demak dan kota-kota lainnya.

#### 7. Industri genteng dan Keramik

Industri Genteng dan Keramik yang berada di Distrik Timur Kabupaten Jepara tepatnya di Desa Mayong Kidul. Mayoritas warga desa ini adalah pengrajin genteng, sudah sejak dahulu kala keahlian mencetak lempeng-lempeng genteng mereka peroleh turun temurun dari nenek moyang mereka dan menjadikan profesi pembuatan genteng ini sebagai tumpuan hidup mereka. Kerajinan ini

dimulai sekitar tahun 1969 menggunakan alat pres manual dari kayu dan seng yang dibentuk cetakan genteng sebelum alat modern buatan pabrik. Sampai tahun 1980 baru menggunakan alat press modern buatan pabrik meski sampai sekarang masih menggunakan tenaga manusia untuk menekan alat pressnya.

Bapak Sukahar mengungkapkan “jumlah perajin di desanya lebih dari 2.000 orang. Secara keseluruhan, di Desa itu terdapat 2.532 keluarga dengan jumlah penduduk 5.229 jiwa. Lahan persawahan di desa ini 143 hektare namun masyarakat enggan menggarap sawah. Mereka semata-mata bergantung ke industri rumah tangga dengan membuat genteng dan batu-bata,” paparnya.

#### **4.1.3 Eksistensi Perbankan Syariah di Jepara**

Eksistensi perbankan Syariah di Indonesia pada awalnya didasarkan pada Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 di mana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga maupun keuntungan-keuntungan bagi hasil. Eksistensi perbankan syari'ah semakin eksis setelah disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan dari Undang-undang no. 7 Tahun 1992. Undang-undang ini membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank

Syari'ah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional dengan sistem syari'ah. UU No.10 tahun 1998 ini sekaligus menghapus Pasal 6 pada PP No.72/1992 yang melarang *dual* sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No.10 tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Selain itu juga, eksistensi perbankan Syari'ah diperkukuh dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004.

Sedangkan menurut pengamatan penulis, eksistensi perbankan syariah di Kabupaten Jepara memang diminati oleh masyarakat. Namun ada beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak mempunyai rekening di bank Syariah antara lain bank syariah kurang adanya sosialisasi, masyarakat masih menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional, letak bank syariah cukup jauh dari tempat tinggal mereka sehingga sulit di jangkau, kurang adanya kantor cabang di Jepara, dan sulitnya mencari ATM bank syariah. Sedangkan yang dirasakan penulis sendiri faktor-faktor diatas adalah benar adanya, apalagi di sekitar tempat tinggal penulis yang



memang sangat jarang memiliki rekening di Bank Syariah karena termasuk di pelosok desa.

Namun menurut hasil angket yang tersebar di Masyarakat Jepara khususnya yang mempunyai Industri Kreatif, mereka memang minat akan bank syariah namun faktor jarak yang begitu jauh dan kurangnya sosialisasi dari bank syariah membuat masyarakat tidak mempunyai rekening di bank Syariah.

#### 4.2 Deskripsi Responden

Responden penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Jepara yang dipilih secara acak oleh peneliti. Adapun rincian deskripsi responden dapat di lihat pada table di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Deskripsi Responden masyarakat Kabupaten Jepara**

No	Kriteria	Jumlah	Persentase
1	Jenis kelamin		
	a. Laki-laki	49	49%
	b. Perempuan	51	51%
	Total responden	100	100%
2	Agama		
		100	100%
		0	0
	Total responden	100%	
3	Pekerjaan		
	a. PNS	5	5%
	b. Karyawan / buruh	6	6%
	c. Pengusaha	85	85%
	d. Lainnya	4	4%
	Total Responden	100	100%

4	Usia		
	a. 20-30	15	15%
	b. 31-40	40	40%
	c. 41-50	30	30%
	d. >50	15	15%
	Total Responden	100	100%
5	Pendapatan		
	a. Rp. 2.000.000	3	3%
	b. Rp. 2.000.000 – Rp. 4.000.000	12	12%
	c. Rp. 4.000.000- Rp. 7.000.000	15	15%
	d. > Rp. 7.000.000	70	70%
	Total Responden	100	100%

### 4.3 Pengujian Kualitas Data

#### 4.3.1 Uji Validitas Data

Uji Validitas digunakan untuk menguji valid atau tidaknya suatu kuesioner. Dapat dikatakan valid jika korelasi dan skor total signifikan. Apabila  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel dan nilai  $r$  positif, maka item pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Berikut adalah hasil pengujian validitas data masyarakat Jepara :

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Validitas Masyarakat Jepara**

No	Kode Variabel		R Hitung	R Tabel	Ket
1	Kesejahteraan Masyarakat (X1)	KA1	0,628	0,196	Valid
		KA2	0,698	0,196	Valid
		KA3	0,723	0,196	Valid
		KA4	0,730	0,196	Valid
2	Industri Kreatif (X2)	KB1	0,911	0,196	Valid
		KB2	0,934	0,196	Valid
		KB3	0,913	0,196	Valid
		KB4	0,862	0,196	Valid
3	Eksistensi Perbankan Syariah (Y)	NM1	0,784	0,196	Valid
		NM2	0,860	0,196	Valid
		NM3	0,938	0,196	Valid
		NM4	0,872	0,196	Valid
		NM5	0,902	0,196	Valid
		NM6	0,861	0,196	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat hasil pengujian validitas pada variable industri kreatif, kesejahteraan masyarakat dan eksistensi perbankan syariah di Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa nilai r hitung keseluruhan indikator yang diuji bernilai positif dan lebih besar dari nilai r tabel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan tersebut adalah valid.

#### **4.3.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Adapun uji reliabilitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Reliabilitas Masyarakat Jepara**

No	Kode Variabel	Cronbach's Alpha	R Tabel	Ket
1	Kesejahteraan Masyarakat (X1)	0,889	0,196	Reliabel
2	Industri Kreatif (X2)	0,926	0,196	Reliabel
3	Eksistensi Perbankan Syariah	0,935	0,196	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Table 4.4 menunjukkan bahwa seluruh item baik dalam variabel X maupun Variabel Y memiliki koefisien alpha lebih besar daripada r table 0,196. Dengan demikian maka kuesioner pada penelitian ini dapat dikatakan reliabel, sehingga dapat dilanjutkan ke langkah berikutnya.

#### **4.4 Uji Asumsi Klasik**

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Adapun hasil uji asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut :

##### **4.4.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi normal atau tidak.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.36777931
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.061
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.177 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 , diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar  $0,177 > 0,05$ . Sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji normalitas *kolmogorov smirnov* diatas, menyatakan bahwa data diatas adalah berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

#### **4.4.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi *ditemukan* adanya korelasi antar

variable independen. Adapun hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.458	1.837		4.605	.000		
KMS	.179	.118	.138	1.514	.133	.740	1.352
IKF	.733	.120	.557	6.125	.000	.740	1.352

a. Dependent Variable: EPS

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 hasil nilai *Tolerance* variabel kesejahteraan masyarakat adalah  $0,740 > 0,10$  dan nilai VIF  $1,352 < 10$  maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan variabel industri kreatif memiliki nilai *Tolerance*  $0,740 > 0,10$  dan nilai VIF  $1,352 < 10$  maka dapat dikatakan juga tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan antar variabel independen dalam model regresi ini tidak terdapat multikolinearitas.

#### 4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.447	1.123		3.958	.000
	KMS	-.020	.072	-.033	-.283	.778
	IKF	-.103	.073	-.163	-1.403	.164

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui nilai signifikansi (Sig.) variable kesejahteraan Masyarakat adalah 0,778, sedangkan variabel industri kreatif 0,164 . Maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena seluruh variabel mempunyai nilai signifikansi > 0,05.

#### 4.5 Interpretasi Persamaan Regresi

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, untuk menentukan persamaan regresi yang terbentuk

dalam penelitian ini, maka dapat diketahui dengan melihat tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Persamaan Regresi**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.458	1.837		4.605	.000
	KMS	.179	.118	.138	1.514	.133
	IKF	.733	.120	.557	6.125	.000

a. Dependent Variable: EPS

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

$$Y = 8,458 + 0,179 X_1 + 0,733 X_2 + e$$

Dari persamaan diatas maka dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 8,458. Artinya jika variable kesejahteraan masyarakat dan industri kreatif tidak dimasukkan dalam penelitian maka eksistensi perbankan syariah pada masyarakat Jepara masih meningkat sebesar 8,458%. Hal ini dapat terjadi karena terdapat variabel lain selain kesejahteraan masyarakat dan industri kreatif.
2. Koefisien regresi pada variable kesejahteraan masyarakat (X1) sebesar 0,179 adalah positif. Dalam hal ini dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan spiritual, pemenuhan kebutuhan material dan akses layanan bank syariah meningkat 1% maka eksistensi



perbankan syariah akan bertambah 0,179% dimana faktor-faktor lain dianggap konstan.

3. Koefisien regresi pada variable industri kreatif (X2) sebesar 0,733 adalah positif. Dalam hal ini di lihat dari indikator industri kreatif yaitu jumlah industri kreatif, volum usaha dan lama usaha meningkat 1% maka eksistensi perbankan syariah akan bertambah sebesar 0,761% dimana faktor-faktor lain dianggap konstan.

#### **4.6 Hasil Pengujian Hipotesis**

Model statistik yang digunakan untuk mengetahui hasil hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan uji  $t_{test}$  , uji  $F_{test}$  , dan uji  $R^2$  (koefisien determinasi).

##### **4.6.1 Uji $t_{test}$ (Uji Parsial)**

Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen. Adapun hasil uji parsial (uji  $t_{test}$ ) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Uji Parsial**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.458	1.837		4.605	.000
	KMS	.179	.118	.138	1.514	.133
	IKF	.733	.120	.557	6.125	.000

a. Dependent Variable: EPS

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji parsial diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Diketahui nilai signifikansi (Sig.) variabel kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 0,133 . Karena nilai Sig.  $0,133 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap eksistensi perbankan syariah di Jepara.

Variabel industri kreatif memiliki nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Karena nilai Sig.  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh industri kreatif terhadap eksistensi perbankan syariah di Jepara.

#### 4.6.2 Uji $F_{test}$ (Uji Pengaruh Simultan)

Uji pengaruh simultan ini digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen secara

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji pengaruh simultan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Uji Pengaruh Simultan**

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	771.148	2	385.574	33.309	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1122.852	97	11.576		
	Total	1894.000	99			

a. Dependent Variable: EPS

b. Predictors: (Constant), IKF, KMS

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Dari uji ANOVA tersebut dihasilkan nilai F hitung sebesar 33,309 dengan probabilitas 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 maka model regresi ini dapat digunakan untuk mengetahui bahwa secara bersama-sama kesejahteraan masyarakat dan industri kreatif berpengaruh terhadap eksistensi perbankan syariah di Jepara.

### 4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.638 <sup>a</sup>	.407	.395	3.402

a. Predictors: (Constant), IKF, KMS

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil tersebut, pada penelitian ini nilai *R Square* adalah 0,407 hal ini berarti 40,7% variasi keputusan dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen (Kesejahteraan masyarakat dan Industri kreatif, sedangkan sisanya (100%-40,7%=59,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab diluar penelitian.

### 4.7 Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini dapat disajikan dalam table berikut :

**Table 4.11**  
**Pembahasan**

Pengaruh Variabel	Variabel	Sig. Uji t
Eksistensi perbankan	Kesejahteraan masyarakat (X1)	0,133
	Industri kreatif (X2)	0,000

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

#### **4.7.1 Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah di Kabupaten Jepara**

Uji parsial (Uji  $t_{test}$ ) pada masyarakat Jepara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa  $t$  hitung pada variable kesejahteraan masyarakat sebesar 1,514 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,133. Dari hasil tersebut maka variabel kesejahteraan masyarakat tidak ada pengaruh terhadap eksistensi perbankan syariah karena nilai signifikansi 0,133 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap eksistensi perbankan syariah, karena persepsi masyarakat masih setengah-setengah tentang bank syariah, kurang sosialisasi dan letak bank syariah itu sendiri yang masih menjadi masalah bagi kebanyakan responden. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Lindia Watie dan Muzdalifah (2017) yang berjudul Persepsi Kelas Menengah Muslim Terhadap Dual Banking Sistem Dalam

membentuk Kekuatan merek Perbankan syariah: yang menyatakan bahwa Penelitian ini menunjukkan dual banking system atau perbankan ganda belum sepenuhnya mampu membangun kekuatan IB sebagai lambang Islamic Bank, yang bermottokan “lebih dari sekedar bank”, meski ada pengaruh persepsi masyarakat kalangan menengah Muslim terhadap keberadaan dual banking system dalam membangun kekuatan merek perbankan syariah. Akan tetapi hanya bernilai 0,49 saja, korelasinya pun tergolong sedang dan positif, yang bermakna tidak begitu kuat namun tidak juga lemah. Artinya persepsi masyarakat tentang dual banking system di masyarakat belum mengakar kuat dan menjangkau masyarakat kalangan menengah Muslim. Masyarakat menengah Muslim belum optimal merasakan manfaat dan kontribusi perbankan syariah dalam membangun perekonomian masyarakat. Meski persepsi kalangan menengah Muslim ini hanya berkontribusi sebesar 19 % dalam membangun kekuatan “Islamic bank (IB), lebih dari sekedar bank”, namun jumlah ini pada dasarnya bisa ditingkatkan, karena apabila jumlah persentase setuju dan sangat setuju pada pernyataan-pernyataan yang membangun harapan positif dijumlahkan maka nilainya melebihi 50 %, artinya lebih dari separuh

responden sebenarnya memiliki harapan yang relatif tinggi terhadap keberadaan dual banking system menjadi tumbuh lebih baik dan besar. Pernyataan-pernyataan pandangan yang memiliki makna membangun harapan positif tersebut antara lain: Saya merasa aman dan nyaman bertransaksi menggunakan jasa Unit Usaha Syariah atau bank syariah dan Saya selalu mengharapkan dan membutuhkan jasa perbankan yang sesuai prinsip syariah dimana pun dan kapan pun. Masyarakat sebenarnya menginginkan perbankan syariah tumbuh besar dan mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dual banking system belum optimal membangun merek yang mengakar dalam pikiran masyarakat kalangan menengah Muslim. Merek “Islamic Bank (IB), lebih dari sekedar bank” belum mampu secara signifikan mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari jasa perbankan syariah yang berada dalam unit bank konvensional (UUS) ataupun yang berdiri sendiri dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS). Terbukti dari hasil penghitungan menggunakan analisis regresi sederhana bahwa nilai kekuatan merek perbankan syariah hanya naik sebesar 0,49 % apabila terjadi kenaikan 1 % persepsi kalangan

menengah Muslim terhadap dual banking. Dibuktikan juga dari hasil korelasi (R) yang bersifat sedang dan positif, selanjutnya R<sup>2</sup> yang bernilai 19 % yang berarti bahwa faktor persepsi dari kalangan menengah Muslim terhadap dual banking system dalam membangun kekuatan merek Islamic Bank (IB) hanya sebesar 19 %. Akan tetapi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sebenarnya masyarakat kalangan menengah Muslim sangat berharap bahwa perbankan syariah dapat tumbuh meningkat secara signifikan dan mampu berperan dalam kehidupan sehari-hari mereka dimanapun dan kapan pun. Oleh sebab itu bank syariah harus bekerja lebih giat supaya bisa menjadi bank yang lebih baik dari semua aspek. Untuk bisa menjadi bank yang melekat di hati masyarakat dibutuhkan usaha yang ekstra keras.

#### **4.7.2 Pengaruh Industri Kreatif Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah di Jepara**

Uji parsial (Uji  $t_{test}$ ) pada masyarakat Jepara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa  $t$  hitung pada variable industry kreatif sebesar 6,125 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil tersebut maka variable industri kreatif berpengaruh signifikan terhadap eksistensi perbankan Syariah nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka



dapat disimpulkan bahwa industri kreatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap eksistensi perbankan syariah karena masyarakat jepara yang mempunyai usaha industri kreatif berjumlah cukup banyak dan rata-rata berminat akan menggunakan jasa bank syariah, hal ini menunjukkan bahwa ada harapan untuk meningkatkan eksistensi Bank Syariah di Jepara , namun lagi-lagi kembali ke Bank Syariah itu sendiri apakah Bank Syariah mampu menjadi pilihan utama para pengusaha industri kreatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Barokah dan Ayu Noviana Hanum (2014) menyatakan bahwa Dari hasil analisis data yang diolah mengenai variabel persepsi nasabah setelah memperoleh pembiayaan dari BPRS Binama, dari proses pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan data para responden , pembiayaan di BPRS binama dinilai mudah, tepat waktu dan baik. Pada variabel Perkembangan UMKM setelah memperoleh pembiayaan mudharabah dengan hasil uji tanda pangkat wilcoxon pada perhitungan modal kerja di dapatkan nilai didapatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$  hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima yaitu ada perbedaan modal antara sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan mudharabah dan mengalami

peningkatan sebesar 165%. Pada perhitungan omset penjualan didapatkan nilai Asymp. Sig. (2tailed) sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima yaitu ada perbedaan omset penjualan antara sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan mudharabah dan meningkat sebesar 79%. Ada perbedaan pada jumlah tenaga kerja setelah mendapat pembiayaan hal ini di buktikan dengan hasil perhitungan dengan tanda pangkat wilcoxon yaitu di dapatkan nilai-nilai Asymp. Sig. (2tailed) sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) dengan mengalami peningkatan sebesar 33%. Dan pada keuntungan di dapatkan nilai-nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) hal ini berarti ada perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya pembiayaan atau meningkat sebesar 82%. Persepsi mudharib BPRS Binama tentang proses informasi pembiayaan, persyaratan, jaminan, verifikasi, pencairan, program credit review, dan penanganan pembiayaan bermasalah dinilai mudah, tepat waktu dan baik. Dan pembiayaan mudharabah dari BPRS Binama efektif untuk perkembangan UMKM hal ini dilihat dari perbedaan pada modal kerja dari rata-rata sebesar Rp. 41.542.000,- sebelum mendapat pembiayaan menjadi rata-rata sebesar Rp. 66.720.000,- atau meningkat sebesar 165% setelah

memperoleh pembiayaan. Pada omset penjualan meningkat dari rata-rata Rp. 15.086.000,- menjadi 26.980.000,- atau meningkat sebesar 79%. Untuk jumlah tenaga kerja meningkat sebesar 33% dan keuntungan terjadi peningkatan dari rata-rata Rp. 5.620.000,- menjadi Rp. 10.220.000,- atau meningkat sebesar 82%

#### **4.7.3 Pengaruh kesejahteraan masyarakat dan industri kreatif Terhadap eksistensi perbankan syariah di kabupaten Jepara.**

Uji Pengaruh Simultan (Uji  $F_{test}$ ) pada masyarakat Jepara dalam penelitian ini dihasilkan nilai  $F$  hitung sebesar 33,309 dengan probabilitas 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dan industri kreatif secara bersama-sama berpengaruh terhadap eksistensi perbankan syariah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif dengan wawancara dan observasi yang dilaksanakan di Kabupaten Jepara tentang eksistensi perbankan syariah dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap eksistensi perbankan syariah hal ini dilihat dari uji t. Di mana nilai signifikansi yang diperoleh  $0,133 > 0,05$ .
2. Industri kreatif berpengaruh positif signifikan terhadap eksistensi perbankan syariah, hal ini dilihat dari uji T, di mana nilai signifikansi yang diperoleh  $0,000 < 0,05$ .
3. Kesejahteraan masyarakat dan industri kreatif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap eksistensi perbankan syariah , hal ini dilihat dari uji F. Di mana nilai signifikansi yang diperoleh  $0,000 < 0,05$ .

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bank syariah diharapkan bisa menambah fasilitasnya, terlebih untuk mengcover kebutuhan spiritual nasabah, karena sesuai tujuan awal dari bank syariah itu sendiri yaitu mencapai falah atau tidak semata-mata mencari profit tetapi juga berusaha meraih kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.
2. Sumber daya manusia bank syariah perlu ditingkatkan untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan bank syariah.
3. Pendirian kantor cabang bank syariah perlu di tambah agar nasabah semakin menjadikan bank syariah sebagai bank pilihan mereka untuk bertransaksi sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rochani “*Strategi Pengembangan Industri Kreatif dalam Mewujudkan Kota Cerdas*” perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Sultan Agung, hal 83-84
- Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: Refika Aditama.
- Arisetiawan, Ronald. 2010. Analisis Persepsi Akuntan Publik dan Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Skripsi, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- As’ad, Syarif . Desember 2012 Vol.8 No.2. “Tingkat Sosialisasi Perbankan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Memilih Bank Syariah di Kotagede Yogyakarta”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.
- Ascarya, 2009. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barkatullah, Abdul Halim . *Problem Eksistensi dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia*, Fakultas Hukum Unlam.
- Cahyadi, Diah Citraresmi. 2013. “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kreatif

Di Kota Denpasar”. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Udayana.

Dagum, Save M. 1990. *Filsafat Eksistensialisme*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Fatwa DSN MUI

Ghozali, Imam. 2011 edisi 5. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: bp Universitas Diponegoro.

Haq, Muhammad Izzul dan Arin Mamlakah Kalamika. Edisi Juli Desember 2016. “Kesejahteraan Nasabah Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Membangun Profesionalisme keilmuan*.

Juliandi, Azuar, Ifar, Saprial Manarung. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi: Sukses Menuju Skripsi*. Medan: UMSU Press.

Lindiawatie dan Muzdalifah “Persepsi Kelas Menengah Muslim Terhadap Dual Banking System dalam Membentuk Kekuatan Merek Perbankan Syariah” *SOSIO-E-KONS*, Vol. 9 No. 3, Desember 2017, hal. 232-243.

Mardani, Dede Aji. 2018 Vol.1, No.1. Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. *Jurnal al-Afkar*.

Michael Sherraden, *Aset untuk orang miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)



- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.
- Mutiara Pradipta, Skripsi: “*Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Padi di desa Sumber Agung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*”(Yogyakarta: UNY, 2017), hal 10-14
- Siregar, Erni Yusnita, Saparudin Siregar dan Andri Soemitra. Vol.2 No.3 Edisi April 2016. “Analisis Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Industri Kreatif Di Sumatra Utara Tahun 2006-2015. *j.EBIS*.
- Siregar, Mulya. Muharram 1423 H Vol.3 No.1. *Agenda Pengembangan Perbankan Syariah untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan, IQTISAD Journal of Islamic Economics*.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan lembaga Keuangan Syariah* .Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiarto, Dergibson Siagian. 2006. *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2012. Cetakan 16. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suyono. 2018. *Analisis Regresi Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.

Umar, Husein. 2010. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* .  
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Usman, Rahmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah  
Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya.

Wiroso. 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha  
Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Lampiran 1 : Hasil Kuesioner Variabel Independen (X)

Resp	X1				Total	X2				Total
	Q1	Q2	Q3	Q4		Q1	Q2	Q3	Q4	
1	4	4	4	4	14	5	5	3	4	17
2	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14
3	4	1	4	2	11	2	2	2	2	8
4	3	3	3	3	12	3	4	3	3	13
5	4	3	5	5	17	4	4	4	4	16
6	2	2	1	1	6	1	1	2	2	6
7	5	5	5	5	20	4	4	4	5	17
8	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12
9	3	4	4	4	35	4	4	4	4	16
10	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
11	4	4	3	3	14	4	4	5	4	17
12	3	3	4	4	14	3	3	3	3	12
13	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
14	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13
15	4	4	3	4	15	3	3	4	4	14
16	4	2	4	4	14	1	2	2	4	9
17	4	4	4	4	16	4	5	4	4	17
18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
19	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15
20	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14
22	4	4	3	3	14	4	3	4	4	15
23	4	3	4	4	15	3	3	3	4	13
24	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13
25	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16
26	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
27	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
28	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
29	3	3	2	2	10	1	1	1	1	4

30	5	4	4	4	17	1	1	1	1	4
31	4	4	4	4	16	1	1	1	1	4
32	4	4	3	5	16	4	3	2	4	13
33	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
34	4	4	5	5	18	4	4	5	3	16
35	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
36	5	5	5	5	20	4	5	4	4	17
37	5	4	4	4	17	4	4	5	4	17
38	5	4	5	4	18	5	4	4	5	18
39	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17
40	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
41	4	4	4	4	16	4	3	3	4	14
42	4	4	4	5	17	3	3	3	4	13
43	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
44	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
45	5	4	4	4	17	2	2	2	2	8
46	1	4	4	3	12	4	3	2	3	12
47	5	5	4	5	19	5	5	5	5	20
48	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
49	5	4	5	4	18	5	4	4	5	18
50	3	3	3	3	12	4	3	3	2	12
51	4	4	3	5	16	5	4	4	4	17
52	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
53	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
54	3	3	3	4	13	4	3	3	4	14
55	4	4	4	5	17	5	5	5	5	20
56	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
57	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
58	4	4	4	5	17	4	4	5	5	18
59	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
60	4	4	4	4	16	2	3	3	4	12
61	4	4	5	5	18	4	4	5	5	18
62	5	4	4	5	18	5	5	4	5	19

63	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
64	3	3	3	3	12	3	2	3	3	11
65	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
66	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
67	3	2	3	4	12	4	3	3	4	14
68	4	4	4	3	15	3	3	3	3	12
69	4	5	4	5	18	5	5	4	4	18
70	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12
71	4	3	3	4	14	3	4	3	4	14
72	4	5	5	5	19	3	4	3	4	14
73	5	4	5	5	19	4	4	4	4	16
74	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16
75	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16
76	4	3	4	4	15	3	2	3	3	11
77	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12
78	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16
79	5	4	5	5	19	4	4	4	4	16
80	4	5	4	5	18	4	4	4	5	17
81	4	3	5	5	17	4	4	3	4	15
82	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
83	4	4	4	5	17	3	3	3	5	14
84	1	1	1	1	4	2	2	2	2	8
85	3	3	4	3	13	4	3	4	4	15
86	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16
87	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15
88	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16
89	5	5	5	5	20	4	3	3	4	14
90	4	4	4	3	15	4	3	4	5	16
91	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
92	4	4	3	3	14	4	4	5	4	17
93	3	3	4	4	14	3	3	3	3	12
94	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
95	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13

96	4	4	3	4	15	3	3	4	4	14
97	4	2	4	4	14	1	2	2	4	9
98	4	4	4	4	16	4	5	4	4	17
99	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
100	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15

Lampiran 2: Variabel Dependen (Y) Eksistensi Perbankan Syariah

Resp	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Total
1	5	3	3	3	4	3	21
2	4	4	4	4	4	3	23
3	4	5	4	4	4	4	25
4	4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	4	4	3	23
6	2	1	2	2	2	2	11
7	5	5	4	5	5	3	27
8	3	3	3	3	3	3	18
9	3	3	4	4	4	4	22
10	4	4	5	5	5	5	28
11	2	4	3	4	2	2	17
12	4	4	4	4	4	4	24
13	3	3	3	4	3	3	19
14	3	3	3	3	3	3	18
15	4	4	4	5	4	4	25
16	3	2	2	1	2	2	12
17	3	3	3	3	3	3	18
18	4	4	4	4	4	4	24
19	3	3	3	4	4	4	21
20	4	4	4	4	4	3	23
21	5	4	4	4	4	4	25
22	5	4	4	4	4	4	25
23	4	3	3	3	3	3	19

24	3	5	5	5	5	4	27
25	5	5	4	4	4	4	26
26	4	4	4	4	4	4	24
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	4	4	4	4	24
29	2	2	2	2	2	2	12
30	2	2	2	2	2	2	12
31	2	2	2	2	2	2	12
32	3	4	3	4	3	2	19
33	4	4	4	4	4	4	24
34	3	3	3	4	1	1	15
35	3	4	3	3	3	3	19
36	4	4	4	4	4	4	24
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	4	5	4	4	4	25
39	4	3	4	4	4	4	23
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	4	4	4	4	3	23
42	4	4	4	4	4	4	24
43	5	4	4	4	4	4	25
44	4	4	4	4	4	4	24
45	4	4	4	5	5	3	25
46	3	4	4	4	4	4	23
47	4	4	4	5	4	4	25
48	4	4	4	4	4	4	24
49	5	4	5	4	4	5	27
50	4	3	4	3	3	3	20
51	5	3	4	5	4	3	24
52	4	4	4	4	4	4	24
53	4	3	4	4	4	3	22
54	4	4	3	3	3	3	20
55	5	5	5	5	5	5	30
56	5	5	5	5	5	5	30

57	4	4	4	4	4	4	24
58	5	5	5	5	5	5	30
59	5	5	5	5	5	5	30
60	4	4	4	4	4	4	24
61	4	3	4	3	3	3	20
62	5	5	4	4	3	3	24
63	4	4	4	4	4	4	24
64	3	3	3	3	3	3	18
65	4	4	4	4	4	4	24
66	4	3	3	4	3	3	20
67	3	3	3	4	4	4	21
68	4	3	3	3	3	3	19
69	3	4	4	5	3	5	24
70	4	3	3	3	3	3	19
71	4	5	4	4	3	3	23
72	4	4	4	4	4	4	24
73	5	4	4	4	4	3	24
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	4	4	4	3	2	21
76	3	3	3	3	3	3	18
77	3	3	3	3	3	3	18
78	4	4	4	4	3	3	22
79	5	4	4	5	4	4	26
80	4	2	3	3	3	3	18
81	3	4	4	4	3	3	21
82	4	4	4	4	4	4	24
83	3	3	3	2	4	2	17
84	2	1	1	1	1	1	7
85	4	4	3	4	4	3	22
86	4	4	4	5	5	5	27
87	4	4	4	4	5	4	25
88	4	4	4	4	4	4	24
89	4	4	3	3	4	3	21



90	4	5	4	4	5	5	27
91	4	4	5	5	5	5	28
92	2	4	3	4	2	2	17
93	4	4	4	4	4	4	24
94	3	3	3	4	3	3	19
95	3	3	3	3	3	3	18
96	4	4	4	5	4	4	25
97	3	2	2	1	2	2	12
98	3	3	3	3	3	3	18
99	4	4	4	4	4	4	24
100	3	3	3	4	4	4	21

Lampiran 3 : Hasil Uji Asumsi Klasik  
Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.36777931
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.061
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.177 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

## Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.458	1.837		4.605	.000		
	KMS	.179	.118	.138	1.514	.133	.740	1.352
	IKF	.733	.120	.557	6.125	.000	.740	1.352

a. Dependent Variable: EPS

## Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.447	1.123		3.958	.000
	KMS	-.020	.072	-.033	-.283	.778
	IKF	-.103	.073	-.163	-1.403	.164

a. Dependent Variable: Abs\_RES

## Lampiran 4 : Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

### Hasil Uji T

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.458	1.837		4.605	.000
	KMS	.179	.118	.138	1.514	.133
	IKF	.733	.120	.557	6.125	.000

a. Dependent Variable: EPS

### Hasil Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	771.148	2	385.574	33.309	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1122.852	97	11.576		
	Total	1894.000	99			

a. Dependent Variable: EPS

b. Predictors: (Constant), IKF, KMS

### Hasil Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.638 <sup>a</sup>	.407	.395	3.402

a. Predictors: (Constant), IKF, KMS

b. Dependent Variable: EPS

## Lampiran 5: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

### Variabel X1 ( Kesejahteraan Masyarakat)

#### Correlations

		VAR00025	VAR00026	VAR00027	VAR00028	VAR00029
VAR00025	Pearson Correlation	1	.637**	.689**	.666**	.628**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00026	Pearson Correlation	.637**	1	.598**	.657**	.698**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00027	Pearson Correlation	.689**	.598**	1	.759**	.723**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00028	Pearson Correlation	.666**	.657**	.759**	1	.730**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00029	Pearson Correlation	.628**	.698**	.723**	.730**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Variabel X2 ( Industri Kreatif)

### Correlations

		VAR00020	VAR00021	VAR00022	VAR00023	VAR00024
VAR00020	Pearson Correlation	1	.837**	.759**	.683**	.911**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00021	Pearson Correlation	.837**	1	.813**	.725**	.934**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00022	Pearson Correlation	.759**	.813**	1	.738**	.913**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00023	Pearson Correlation	.683**	.725**	.738**	1	.862**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00024	Pearson Correlation	.911**	.934**	.913**	.862**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Variabel Y ( Eksistensi Perbankan Syariah )

### Correlations

		VAR00030	VAR00031	VAR00032	VAR00033	VAR00034	VAR00035	VAR00036
VAR00030	Pearson Correlation	1	.623**	.702**	.555**	.672**	.570**	.784**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
VAR00031	Pearson Correlation	.623**	1	.805**	.762**	.687**	.621**	.860**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
VAR00032	Pearson Correlation	.702**	.805**	1	.820**	.797**	.780**	.938**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
VAR00033	Pearson Correlation	.555**	.762**	.820**	1	.718**	.680**	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
VAR00034	Pearson Correlation	.672**	.687**	.797**	.718**	1	.818**	.902**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
VAR00035	Pearson Correlation	.570**	.621**	.780**	.680**	.818**	1	.861**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
VAR00036	Pearson Correlation	.784**	.860**	.938**	.872**	.902**	.861**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel X1

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.889	4

Variabel X2

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.935	6

Variabel Y

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.935	6

Lampiran 5 : Kuesioner

**A. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : .....

Jenis Kelamin  Laki-laki  Perempuan

Agama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : a. PNS c. Pengusaha  
b. Karyawan/Buruh d. lainnya

Usia : a. 20-30  
c. 41-50  
b. 31-40  
d. >50

Penghasilan rata-rata per bulan:  
a. < Rp. 2.000.000,00  
b. Rp. 2.000.000,00 –  
Rp. 4.000.000,00  
c. Rp. 4.000.000,00-  
Rp. 7.000.000,00  
d. >Rp. 7.000.000,00

Apakah Anda memiliki rekening di Bank Syariah:

- a. Iya
- b. Tidak



## **B. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET**

1. Berikan tanda (√) pada jawaban yang Saudara/Saudari anggap paling benar.
2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
3. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya.
4. Ada empat alternatif jawaban, yaitu:
  - 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
  - 2 = Tidak Setuju (TS)
  - 3 = Kurang Setuju (KS)
  - 4 = Setuju (S)
  - 5 = Sangat Setuju (SS)

## 1. Kesejahteraan Masyarakat

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Pendapatan saya sudah memenuhi kebutuhan primer ( sandang, pangan dan papan)					
2.	Saya mampu memenuhi kebutuhan sekunder ( alat transportasi, rumah, rekreasi gadget, dll)					
3.	Kebutuhan spiritual ( agama) saya terpenuhi					
4.	Keberadaan pusat-pusat layanan perbankan syariah dan jarak tempuh menuju bank syariah mudah dijangkau					

## 2. Industri Kreatif

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya memiliki industri kreatif					
2.	Industri kreatif saya mengalami perkembangan dari rahun ke tahun dilihat dari sisi modal, omset penjualan, jumlah tenaga kerja dan keuntungan meningkat					
3.	Saya sudah sejak lama mempunyai usaha industri kreatif					
4.	Usaha industri kreatif saya berdiri secara turun temurun					

## 3. Eksistensi Bank Syariah

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya mengerti produk Bank Syariah					
2.	Saya menggunakan Bank Syariah untuk transaksi sehari-hari					
3.	Saya mengetahui perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional					

4.	Adanya keuntungan dalam Bank syariah					
5.	Lokasi ATM mudah dijangkau dan ditemui					
6.	Saya tertarik menggunakan produk Bank Syariah					